



- Sigit Dwi Nuridha
- Yudi Suparyanto
- Aprilia Nur Kurniawati

#### **MENGACU:**

Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016  
tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan  
dan

Permendikbud RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang  
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti  
dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada  
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Kunci Jawaban dan Pembahasan PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**Mata Pelajaran Wajib**

**SMA/MA  
Kelas  
XI  
Semester 1**

*PT Penerbit Intan Pariwara*

# Daftar Isi

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila .....</b>	<b>3</b>
A. Hakikat Hak Asasi Manusia, <b>3</b>	
B. HAM dalam Dasar Negara, Konstitusi Negara, dan Peraturan Perundang-undangan, <b>6</b>	
C. Pelanggaran HAM di Indonesia, <b>8</b>	
D. Upaya Penegakan HAM dalam Perspektif Pancasila, <b>11</b>	
<b>BAB II Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia .....</b>	<b>17</b>
A. Penerapan Sistem Demokrasi, <b>17</b>	
B. Sistem Demokrasi Pancasila, <b>19</b>	
C. Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, <b>21</b>	
D. Membangun Kehidupan Demokratis Sesuai UUD NRI Tahun 1945, <b>24</b>	
<b>Penilaian Tengah Semester 1 .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III Sistem Hukum dan Peradilan Nasional .....</b>	<b>39</b>
A. Sistem Hukum Nasional, <b>39</b>	
B. Sistem Peradilan Nasional, <b>41</b>	
C. Menunjukkan Perilaku Sesuai Hukum Nasional, <b>44</b>	
<b>Penilaian Akhir Semester 1 .....</b>	<b>50</b>
<b>Remedial Semester 1 .....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

### Pendalaman Materi

#### A. Hakikat Hak Asasi Manusia

### Uji Kompetensi 1

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Menurut G.J. Wolhorts, HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap pribadi manusia. HAM tidak dapat dicabut oleh siapa pun karena kemanusiaannya. Apabila HAM dicabut, hilang juga kemanusiaannya. Artinya, manusia akan kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya dan cenderung menjadi pribadi pemberontak.

2. **Jawaban: e**

Universal atau menyeluruh, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Kata yang bergaris bawah pada soal adalah kata "setiap". Kata "setiap" menandakan bahwa tiap-tiap manusia memiliki hak yang sama, tanpa terkecuali. Gambar pada soal menyatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

3. **Jawaban: d**

*Privilege* atau keistimewaan berarti keadaan di mana seseorang memiliki sebuah keistimewaan untuk melakukan sesuatu, bukan karena diwajibkan. Andi berhak mendapatkan keistimewaan mengikuti program pertukaran pelajar karena ia mendapat juara satu dalam perlombaan. *Claim* adalah suatu situasi di mana seseorang memiliki hak menuntut atau meminta. Hak dan kewajiban menjadi satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Andi berhak menuntut *reward* karena juara satu, sedangkan Rio tidak berhak menuntut *reward* yang sama. Penyelenggara berkewajiban memberikan *reward* kepada Andi sebagai pemenang lomba cerdas cermat.

4. **Jawaban: c**

Unsur dasar yang tergolong "*secondary rules*" yaitu kuasa atau *power* dan kekebalan atau *immunity*. Kelompok "*secondary rules*" akan memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan dan pembatalan terhadap klaim dan keistimewaan.

5. **Jawaban: a**

Setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh penghidupan yang layak. Hak tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, informasi, dan hak untuk berpendapat.

6. **Jawaban: a**

Menurut teori kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki semua orang di mana saja dan kapan saja. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan.

7. **Jawaban: a**

Utuh artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Bu Siwi telah memperkecil jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Bu Kiki. Artinya, hak Bu Kiki untuk mendapatkan uang sejumlah yang telah dipinjamkan tidak terpenuhi.

8. **Jawaban: a**

Klaim (*claim*) adalah suatu situasi, yakni seseorang memiliki hak untuk menuntut atau meminta. Berdasarkan gambar pada soal, pembeli berhak meminta barang dagangan setelah melaksanakan kewajiban membayar sesuai kesepakatan. Penjual berhak menuntut uang pembayaran setelah berkewajiban menyerahkan barang dagangan.

9. **Jawaban: c**

Apabila keberadaan HAM difungsikan dengan baik, tujuan HAM akan tercapai. Tujuan adanya hak asasi manusia sebagai berikut.

- 1) Melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
- 2) Mengembangkan rasa saling menghargai antarmanusia.
- 3) Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

**10. Jawaban: b**

Pilihan **b** menunjukkan prinsip kesetaraan (*equality*). Kesetaraan yang dimaksud berarti kesetaraan menjadi anggota partai politik sesuai ketentuan pada pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa "Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". Pilihan **a** dan **c** merupakan pernyataan prinsip kewajiban positif. Menghormati setiap orang yang berbeda agama maupun mengunjungi tetangga baru merupakan kewajiban positif seseorang terhadap sesama. Pilihan **d-e** merupakan pernyataan prinsip nondiskriminasi sehingga tidak terjadi tindakan diskriminasi terhadap status sosial maupun kondisi fisik seseorang.

11. **Jawaban: a**

Hak asasi manusia memiliki dimensi dan nilai universal. Artinya, HAM harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada alinea I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kalimat "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan" menunjukkan

dimensi universal HAM, yaitu kemerdekaan sebagai hak asasi yang harus dinikmati oleh segala bangsa di dunia (seluruh umat manusia).

12. **Jawaban: a**

Hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapa pun karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Dengan demikian, setiap individu berhak atas seluruh haknya secara utuh karena tidak ada satu orang pun dapat menambah dan mengurangi hak orang lain.

13. **Jawaban: b**

Pelaksanaan kewajiban dasar manusia berbanding lurus dengan penegakan HAM. Artinya, jika kewajiban dasar manusia dapat dilaksanakan dengan baik, penegakan HAM akan berjalan baik pula. Pelanggaran atau pengingkaran terhadap kewajiban dasar manusia mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

14. **Jawaban: c**

Menurut teori hak positivisme, hak seharusnya memiliki sumber yang jelas, tertuang dalam wujud nyata, serta diciptakan atau diberikan oleh konstitusi. Teori ini menolak teori hak alami atau kodrati yang menyatakan bahwa hak dimiliki oleh siapa saja dan di mana saja. Teori ini menegaskan bahwa hak dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

**15. Jawaban: c**

Kalimat "... adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun" mengindikasikan adanya sifat asasi dalam hak-hak tersebut. Asasi berarti bahwa hak bersifat dasar dan pokok sehingga hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

**B. Uraian**

1. **Jawaban:**

Salah satu sifat hak asasi manusia adalah permanen. Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain. Apabila hak asasi manusia dicabut, manusia akan kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Artinya, manusia akan cenderung menjadi pribadi pemberontak.

**2. Jawaban:**

Dalam proses kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik. Guru berkewajiban memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Guru juga berhak diperhatikan oleh peserta didik terkait dengan materi yang disampaikan. Selain itu, peserta didik berkewajiban memperhatikan penjelasan dari guru dan berhak mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan melalui materi yang disampaikan guru.

**3. Jawaban:**

Berdasarkan prinsip kewajiban positif, setiap negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. Kaitannya dengan kebebasan berekspresi, negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Pada aspek hak hidup, negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak dan kebebasan warganya. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Alasan inilah yang melatarbelakangi negara membuat aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

**4. Jawaban:**

Sifat-sifat hak asasi manusia sebagai berikut.

- a. Universal atau menyeluruh, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia, tanpa terkecuali.
- b. Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Hal ini karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.

**5. Jawaban:**

- a. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut Rhona K.M. Smith sebagai berikut.
  - 1) Prinsip kesetaraan (*equality*).
  - 2) Prinsip pelarangan diskriminasi (*non-discrimination*).
  - 3) Prinsip kewajiban positif setiap negara.
- b. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut Manfred Nowak sebagai berikut.
  - 1) Prinsip universal (*universality*).
  - 2) Prinsip ketergantungan (*interdependence*).
  - 3) Prinsip saling terkait (*interrelated*) atau prinsip tidak terbagi (*indivisibility*).

## B. HAM dalam Dasar Negara, Konstitusi Negara, dan Peraturan Perundang-undangan

### Uji Kompetensi 2

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Menunjuk pengacara dalam kasus yang di meja hijau merupakan salah satu upaya memperoleh keadilan. Untuk mendapatkan keadilan, setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak penyidikan sampai putusan pengadilan yang telah inkrah. Keadilan akan didapatkan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Pengaduan yang disampaikan akan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. **Jawaban: a**

Tata tertib sekolah merupakan peraturan yang wajib ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Tata tertib merupakan salah satu bentuk kesepakatan melalui kegiatan musyawarah. Dengan menaati tata tertib, seseorang telah memenuhi kewajiban melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab.

3. **Jawaban: b**

Hak atas kebebasan pribadi merupakan kebebasan yang berlaku sesuai keinginan dan kehendak masing-masing. Kebebasan yang telah dimiliki harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak kebebasan pribadi ditunjukkan oleh pernyataan **b**. Pernyataan tersebut menunjukkan kebebasan untuk berpindah tempat atau keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpergian ke luar negeri secara legal merupakan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Jawaban: b**

Dalam konstitusi negara, hak warga negara Indonesia tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal-pasal berikut.

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat (2)).
- 2) Hak membela negara (pasal 27 ayat (3)).
- 3) Hak berpendapat (pasal 28).
- 4) Hak kemerdekaan memeluk agama (pasal 29 ayat (2)).
- 5) Hak mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat (1)).
- 6) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial (pasal 34 ayat (1–3)).

5. **Jawaban: e**

Sila keadilan sosial mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu hak milik dan jaminan sosial serta hak mendapat pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Perlindungan kesehatan diwujudkan pemerintah dengan membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan program yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

6. **Jawaban: a**

Pengadilan merupakan tempat untuk mengadili sebuah perkara. Seseorang akan berusaha mendapatkan haknya walaupun harus berjuang melalui jalur hukum. Banding maupun kasasi merupakan bentuk upaya mencari keadilan demi mendapatkan sebuah hak. Upaya tersebut merupakan hak setiap orang yang terjerat kasus hukum. Hak atas peradilan telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **Jawaban: c**

Gambar pada soal merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Membuang sampah pada tempatnya menunjukkan upaya menghormati hak seseorang seperti yang tercantum dalam pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal, **hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat**, hak pelayanan kesehatan, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi".

8. **Jawaban: c**

Gambar pada soal merupakan lambang sila keempat Pancasila. Nilai kerakyatan pada sila keempat menempatkan rakyat pada posisi tertinggi di negeri ini. Dalam kehidupan demokrasi, rakyat berhak dipilih maupun memilih. Rakyat juga berhak menyampaikan pendapat atau diikutsertakan dalam penyelenggaraan musyawarah.



9. **Jawaban: b**

Ketentuan pada soal terdapat dalam pasal 67 dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada intinya ketentuan tersebut menjelaskan bahwa masalah hak asasi manusia merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Upaya penegakan HAM membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat.

10. **Jawaban: d**

Berdasarkan cerita pada soal Galih hendak melibatkan diri dalam organisasi dengan menduduki jabatan sebagai ketua OSIS melalui pemilu sekolah. Ikut serta dalam organisasi dan menduduki jabatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam sila keempat Pancasila.

11. **Jawaban: a**

Surat kabar merupakan salah satu media komunikasi. Melalui surat kabar, setiap orang akan mendapatkan informasi. Menurut pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang ada. Selain surat kabar, media massa yang dapat memberikan informasi, yaitu televisi dan radio.

12. **Jawaban: e**

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tentang persamaan kesempatan dalam pemerintahan diatur pada pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.



13. **Jawaban: d**

Cuplikan berita pada soal menunjukkan adanya pemenuhan hak warga negara di bidang pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C

ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

14. **Jawaban: b**

Mendengarkan nasihat orang tua merupakan salah satu bentuk penghormatan HAM di lingkungan keluarga. Nasihat yang diberikan orang tua merupakan pendapat yang harus kita dengarkan. Mendengarkan seseorang yang sedang berbicara merupakan salah satu hak yang harus dihormati oleh setiap orang. Hak kebebasan berpendapat juga dilindungi dan dijamin dengan undang-undang.

15. **Jawaban: d**

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan bunyi sila keempat Pancasila. Nilai kerakyatan mengandung arti sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan penuh atas negara.

## B. Uraian

**Jawaban:**

Seseorang memiliki hak untuk menentukan perbuatan yang akan dilakukan sesuai dengan hati nurani. Apabila perbuatan itu baik sebaiknya dilakukan. Sebaliknya apabila perbuatan itu buruk seharusnya dihindari. Menjenguk orang yang sakit merupakan perbuatan terpuji. Berdasarkan nilai kemanusiaan, kita seharusnya memiliki sikap saling peduli terhadap sesama. Menengok orang yang sakit merupakan kewajiban asasi setiap orang.

2. **Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**3. Jawaban:**

Salah satu hak wanita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya apabila telah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Akan tetapi, Bu Nanik tidak memiliki hak mempertahankan kewarganegaraannya apabila hukum negara suami menghendaki kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Apabila hukum negara suami tidak menghendaki yang demikian, istri dapat mempertahankan haknya untuk berkewarganegaraan Indonesia.

**4. Jawaban:**

Kegiatan pada gambar penting dilakukan karena setiap orang berhak mendapatkan penghormatan yang layak dan terhormat. Menolong sesama

dengan mengadakan bakti sosial merupakan salah satu upaya menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan sesama. Kegiatan bakti sosial merupakan cerminan pemenuhan hak sesuai sila kelima Pancasila.

**5. Jawaban:**

Seseorang memiliki pilihan untuk menggunakan hak, tetapi tidak memiliki pilihan tidak melakukan perbuatan yang dibebankan kepadanya sebagai sebuah kewajiban. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Sebaliknya, jika kewajiban dasar manusia dilaksanakan dengan baik, HAM dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, hak selalu berkaitan dengan kewajiban, bahkan sifatnya mengikat. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau tidak ada hak asasi tanpa kewajiban asasi.

## Pendalaman Materi

### C. Pelanggaran HAM di Indonesia

#### Uji Kompetensi 3

##### A. Pilihan Ganda

**1. Jawaban: e**

Sikap tidak toleran akan mengakibatkan munculnya rasa saling tidak menghormati dan menghargai keberadaan orang lain. Karyawan dealer tersebut memandang rendah kedudukan seseorang berdasarkan penampilan saja. Sikap tidak toleran harus dihilangkan dengan saling menghormati hak seseorang.

**2. Jawaban: e**

Nepotisme merupakan perilaku yang cenderung mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintah. Perbuatan nepotisme telah melanggar hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Apabila nepotisme tidak dilakukan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperebutkan sebuah kedudukan.

**3. Jawaban: a**

Kesenjangan antarsesama merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Tidak memberikan gaji yang telah menjadi hak seorang pekerja rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pekerja berhak mendapat upah dari segala yang diusahakannya ketika bekerja. Waktu pemberian upah bagi seorang pekerja rumah tangga dalam kurun waktu satu tahun merupakan bentuk ketidakseimbangan.

**4. Jawaban: c**

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama, dengan cara seperti membunuh anggota kelompok.



5. **Jawaban: c**

Hukuman pidana berupa kurungan penjara merupakan salah satu akibat yang akan timbul dari adanya pelanggaran HAM. Pelaku pelanggaran HAM berat akan mendapatkan vonis hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Apabila pelanggaran dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 maka akan diadili oleh pengadilan HAM *Ad Hoc* sebelum adanya pengadilan HAM.

6. **Jawaban: d**

Pengadilan HAM *Ad Hoc* merupakan pengadilan HAM sementara sebelum dibentuknya pengadilan HAM permanen. Pengadilan HAM *Ad Hoc* berfungsi untuk mengadili pelanggaran HAM sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah **d** karena peristiwa Timor Timur terjadi tahun 1974–1999. Sementara itu, peristiwa bom Bali terjadi pada 2002 dan kasus Munir pada 2004.

7. **Jawaban: a**

Pelanggaran yang akan diadili di pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya undang-undang tentang pengadilan HAM. Contoh pelanggaran HAM berat yang diadili pada pengadilan HAM *Ad Hoc*, yaitu peristiwa Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998.



8. **Jawaban: c**

Memberikan pengertian maupun nasihat sangat diperlukan agar seseorang mengetahui tujuan adanya pengusutan. Setelah mereka paham, perlu adanya jangka waktu untuk mengemasi barang-barang. Perbuatan yang bersifat pemaksaan, bahkan dengan tindak kekerasan dapat berujung pada kejahatan kemanusiaan.

9. **Jawaban: d**

Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk melalui keputusan presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendapat hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

10. **Jawaban: d**

Pernyataan pada pilihan **a** merupakan kewajiban seorang polisi untuk menciptakan ketertiban. Pernyataan **b** merupakan pelanggaran hak berpendapat, sedangkan pernyataan **c** merupakan bentuk kejahatan. Pernyataan **e** merupakan

bentuk terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah pernyataan **d**. Hukuman penjara merupakan salah satu akibat sebuah pelanggaran.

11. **Jawaban: d**

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri si pelanggar yang akan mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Faktor-faktor eksternal ditunjukkan oleh angka **2)**, **4)**, dan **5)**. Adapun angka **1)** dan **3)** merupakan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri manusia yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran HAM.

12. **Jawaban: e**

Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus Abepura terjadi pada tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan pada tahun yang sama. Dengan demikian, kasus ini dapat disidangkan melalui pengadilan HAM. Kasus ini disidangkan melalui pengadilan HAM di Makassar pada tahun 2005.

13. **Jawaban: a**

Seluruh pilihan jawaban merupakan sifat buruk seseorang. Tidak memberikan kesempatan seseorang untuk menyampaikan pendapat merupakan salah satu bentuk sifat egois dalam diri seseorang. Egois berarti ingin menang sendiri. Sikap egois ditunjukkan ketika ketua RT menginginkan pendapatnya diterima dalam forum.

14. **Jawaban: d**

Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan pengusiran. Kewenangan mengadili kasus ini ada pada pengadilan HAM jika kasus tersebut terjadi

setelah tahun 2000. Jika kejahatan tersebut terjadi sebelum tahun 2000, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan HAM *Ad Hoc*.

15. **Jawaban: c**

Pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang dimiliki seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

## B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pengadilan HAM *Ad Hoc* merupakan pengadilan HAM sementara. Pengadilan ini akan mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, setelah pengadilan HAM terbentuk, kasus pelanggaran berat akan diadili oleh pengadilan HAM permanen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Jawaban:**

Ketidaktegasan aparat penegak hukum yaitu sikap permisif dari penegak hukum terhadap pelanggaran HAM. Sikap penegak hukum yang demikian akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya karena sikap permisif tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran HAM. Jadi, para pelaku akan cenderung mengulangi perbuatannya.

3. **Jawaban:**

Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban orang lain. Menurut Philipus M. Hudjon, keseimbangan hak dan

kewajiban merupakan elemen penting negara hukum agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

4. **Jawaban:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat dua mekanisme pengadilan, yaitu pengadilan HAM dan pengadilan *HAM Ad Hoc*. Kasus pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, jika pelanggaran hak termasuk dalam pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (pembunuhan besar-besaran atau pemusnahan etnik) dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Adapun pengadilan *HAM Ad Hoc* digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu atau sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

5. **Jawaban:**

Akibat dari perbuatan pelanggaran HAM berat sebagai berikut.

- Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan.
- Adanya rasa dendam dan kebencian antar-sesama.
- Merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan.
- Menciptakan kekerasan dan konflik antar-sesama.
- Menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban.

## D. Upaya Penegakan HAM dalam Perspektif Pancasila

### Uji Kompetensi 4

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Membuat peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sebuah pelanggaran. Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran akan hak cipta sebuah karya seseorang.

2. **Jawaban: d**

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengharuskan semua dokumen hukum negara mulai UUD, Tap. MPR, UU/perpu, PP, perpres, dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang hak asasi manusia, substansinya harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, perundang-undangan yang bersangkutan akan batal demi hukum.

3. **Jawaban: b**

Tokoh pada gambar adalah Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si yang akrab disapa Kak Seto. Beliau merupakan psikolog anak yang menjabat sebagai ketua komisi nasional perlindungan anak.

4. **Jawaban: b**

Komnas Perempuan merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya penegakan HAM. Komnas Perempuan menangani masalah pelanggaran HAM, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Dengan demikian, kasus yang tepat untuk ditangani komnas antikekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan di angkutan umum dan penyiksaan terhadap seorang wanita dalam keluarga.

5. **Jawaban: d**

Dalam kasus tersebut, pelaku berhasil tertangkap tangan oleh petugas dan komnas HAM. Tertangkap tangan berarti pelaku kejahatan ter-

tangkap saat melancarkan aksi kejahatan. Dalam kondisi tersebut petugas dapat mengamankan atau menangkap pelaku tanpa harus menunjukkan atau menyerahkan surat penangkapan. Dengan demikian, tanpa harus menyerahkan surat penangkapan petugas harus segera menyerahkan pelaku kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyidikan akan dilakukan oleh jaksa agung yang selanjutnya akan membuat penuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan HAM.

6. **Jawaban: c**

Upaya penegakan HAM dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah adalah melakukan musyawarah pembentukan panitia *classmeeting*. Dalam musyawarah setiap pihak yang terlibat berhak mengungkapkan pendapat dan keinginannya terkait penyelenggaraan *classmeeting*.

7. **Jawaban: c**

Menurut undang-undang, keberadaan komnas HAM bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

8. **Jawaban: a**

Studi banding merupakan salah satu program yang dapat dilakukan dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian. Indonesia melalui komnas HAM dapat mengkaji pelaksanaan hak asasi manusia di negara lain. Perwakilan Indonesia juga dapat melakukan pengkajian dan penelitian terkait instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Indonesia juga dapat bekerja sama dengan negara lain demi menegakkan hak asasi manusia.

9. **Jawaban: a**

Setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya kasus pelanggaran HAM dengan alasan yang kuat, komnas HAM akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan akan dilakukan sendiri oleh pihak komnas HAM. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan pelanggaran yang terjadi tergolong pelanggaran HAM berat atau tidak.

10. **Jawaban: d**

Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya merupakan salah satu kewenangan penyidik dalam tahap penyelidikan. Kewenangan lain yang dimiliki penyidik sebagai berikut.

- 1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HAM.
- 2) Menerima laporan atau pengaduan serta mencari keterangan dan bukti.
- 3) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- 4) Meninjau dan mengumpulkan keterangan serta menggeledah tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.



**Jawaban: d**

Seluruh warga negara dapat berperan serta dalam upaya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Salah satu bentuk upaya yang dapat kita lakukan adalah menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Dengan demikian, kita memiliki kesempatan luas untuk berperan serta dan membantu upaya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

12. **Jawaban: d**

Mendengarkan pendapat anggota diskusi merupakan wujud menghargai hak seseorang dalam mengemukakan pendapat. Tidak memotong pendapat anggota diskusi berarti telah ikut serta dalam upaya penegakan HAM karena setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang.

13. **Jawaban: b**

Upaya preventif terhadap pelanggaran HAM dilakukan sebelum pelanggaran HAM terjadi. Bentuk pencegahan terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui upaya berikut.

- 1) Membuat peraturan tentang HAM.
- 2) Membuat lembaga pemantau pelaksanaan HAM.
- 3) Melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat.
- 4) Memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKn.

14. **Jawaban: c**

Peran serta secara individu dapat ditunjukkan dengan berperilaku sesuai HAM dan selalu memperhatikan nilai-nilai dalam HAM. Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM merupakan salah satu upaya penegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM akan mampu diminimalisasi dan dihindari apabila seluruh individu atau perseorangan di Indonesia menghargai dan menjunjung tinggi HAM.



**Jawaban: e**

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan presiden
- 6) Peraturan daerah provinsi
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR tepatnya Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 mengatur tentang hak asasi manusia.

**B. Uraian**



**Jawaban:**

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan ketentuan lebih lanjut yang akan memerinci ketentuan dalam undang-undang. Sebagai contoh, dalam pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan presiden. Peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Peraturan presiden ini nantinya akan memerinci ketentuan dalam undang-undang.

**2. Jawaban:**

Tahapan yang ditunjukkan pada huruf X merupakan tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Penyidikan dalam proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh jaksa agung dengan mengangkat penyidik *Ad Hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah maupun masyarakat.

**3. Jawaban:**

Komnas HAM, jaksa agung, dan pengadilan memiliki peran yang saling terintegrasi dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM. Komnas HAM dapat membentuk tim *Ad Hoc* yang terdiri atas komnas HAM dan unsur masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Jika setelah proses penyelidikan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran berat, kasus akan

diberhentikan. Akan tetapi, apabila proses penyelidikan menyatakan adanya pelanggaran HAM berat maka akan dilimpahkan kepada kejaksaan agung untuk proses penyelidikan dan penuntutan. Selanjutnya, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan HAM dan dapat dimintakan banding atau kasasi.

**4. Jawaban:**

Kegiatan sosialisasi HAM dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap warga negara terkait hak dan kewajiban asasi manusia. Kesadaran HAM perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi. Melalui sosialisasi, HAM akan mampu dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi tentang penegakan dan pengamalan nilai HAM akan mampu meningkatkan pemahaman HAM masyarakat. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan berujung pada kesadaran HAM yang tinggi.

**5. Jawaban:**

Komnas HAM dalam fungsi mediasi memegang tugas dan wewenang sebagai berikut.

- Mendamaikan kedua belah pihak.
- Menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- Memberi saran kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

## Penilaian Harian

### A. Pilihan Ganda

**1. Jawaban: d**

Sebuah hak dapat dikatakan sebagai "hak" ketika ia memiliki salah satu unsur dasar hak. Keistimewaan dan klaim merupakan "*primary rules*" yang menuntut orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Lebih tepatnya keistimewaan dan klaim tertuju pada segala tindakan fisik. Melalui "*primary rules*", kita dapat mengetahui apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak. Sementara itu, kuasa dan kekebalan tergolong dalam kelompok "*secondary rules*" yang memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan dan pembatalan terhadap "*primary rules*".

**2. Jawaban: d**

Prinsip nondiskriminasi berarti tidak adanya kesenjangan perbedaan perlakuan sehingga setiap orang diperlakukan sama atau setara. Suatu tindakan dikatakan diskriminasi apabila ada perlakuan membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalisme atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya. Pada soal, adanya akses jalan untuk difabel berarti tidak adanya diskriminasi terhadap kondisi fisik seseorang.

3. **Jawaban: a**

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak alami atau kodrati. Penganut teori ini berpendapat bahwa hak harus tertuang dalam wujud yang nyata. Selain itu, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, seperti hukum negara. Menurut teori ini, teori kodrati tidak memiliki sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

4. **Jawaban: b**

Seseorang dikatakan memiliki kuasa ketika ia memiliki kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau milik sendiri. Wasit memiliki kuasa untuk mengatur jalannya proses pertandingan. Ia memiliki hak untuk memulai, memberi jeda, memberi hukuman, atau menghentikan sebuah pertandingan.

5. **Jawaban: b**

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Setiap orang memiliki hak untuk bekerja, seperti ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Atas hak bekerja, setiap orang berhak mendapatkan imbalan sesuai pekerjaannya. Pemberian imbalan sebagai pemenuhan hak mencerminkan adanya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

6. **Jawaban: b**

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Ketentuan ini ditunjukkan oleh pilihan **b**. Adapun pilihan **c** dan **d** merupakan hak asasi manusia yang dijamin sila keempat. Pilihan **a** dijamin sila pertama dan **e** dijamin sila ketiga.

7. **Jawaban: a**

Ratih mendapatkan haknya, yaitu bekerja dan mendapatkan gaji sesuai posisi di konveksi tempat ia bekerja. Hak Ratih tersebut sesuai ketentuan pasal 28D ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

8. **Jawaban: a**

Keikutsertaan dalam pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan salah satu bentuk hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara berdasarkan asas pemilu.

9. **Jawaban: a**

Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintah untuk anak-anak usia 7–18 tahun. Melalui kartu tersebut, keluarga kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya secara gratis. Bersekolah, mendapatkan pendidikan, maupun pengajaran merupakan contoh hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. **Jawaban: a**

Hak pribadi merupakan hak yang diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa semenjak dilahirkan. Salah satu hak pribadi, yaitu hak untuk beragama. Pernyataan yang tepat terdapat pada pilihan **a**. Pilihan **b** dan **e** merupakan implementasi hak asasi hukum. Pilihan **c–d** merupakan implementasi hak asasi ekonomi.

11. **Jawaban: a**

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan penganiayaan.

12. **Jawaban: d**

Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh jaksa agung. Adapun proses penuntutan kasus pelanggaran HAM dilakukan setelah terjadinya proses penahanan.

13. **Jawaban: a**

Putra melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun 2003 setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Dengan demikian, pengadilan yang berhak memproses dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Putra adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

14. **Jawaban: e**  
Pengadilan HAM *Ad Hoc* merupakan pengadilan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu atau sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kasus pelanggaran HAM yang sesuai mekanisme pengadilan *Ad Hoc* adalah kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.
15. **Jawaban: a**  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Komnas HAM memiliki beberapa fungsi di antaranya fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi terhadap dugaan pelanggaran HAM.
16. **Jawaban: d**  
Kontras berusaha memegang prinsip-prinsip pada soal demi terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apa pun, termasuk yang berbasis gender.
17. **Jawaban: c**  
Wacana pada soal telah menegaskan bahwa berita penggelapan itu baru bersifat dugaan. Sikap paling tepat yang harus dilakukan, yaitu menasihati dan memberi penjelasan kepada teman. Perilaku menyindir seseorang secara verbal maupun melalui media cetak merupakan tindakan perundungan (*bullying*). Perundungan merupakan perbuatan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis.
18. **Jawaban: c**  
Pengadilan HAM bukan merupakan sistem peradilan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pengadilan umum atau bagian dari peradilan negeri.
19. **Jawaban: d**  
Kasasi, *verzet* (perlawanan), banding, dan peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang dapat diajukan apabila terdapat pihak yang tidak

terima dengan putusan pengadilan. Sementara itu, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan pihak korban demi tegaknya hukum dan keadilan.

20. **Jawaban: e**  
Pelanggaran berat HAM akan diperiksa dan diputuskan melalui tahap penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahapan tersebut secara terperinci telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## B. Uraian

1. **Jawaban:**  
Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat dalam setiap pribadi manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, dicabut, atau diingkari oleh siapa pun juga. Apabila HAM dicabut, sifat-sifat kemanusiaan manusia akan hilang. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. **Jawaban:**  
Perbuatan dikatakan melanggar prinsip non-diskriminasi apabila telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap setiap manusia. Sesuatu akan dikatakan sebagai tindakan melanggar prinsip nondiskriminasi apabila membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalisme atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya.
3. **Jawaban:**  
Hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila hak tersebut dilanggar, seseorang tidak akan dapat menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan atau hak atas kesehatan. Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak merupakan modal dasar bagi setiap orang.

4. **Jawaban:**

Beberapa contoh hak asasi ekonomi yang dijamin negara sebagai berikut.

- Hak memperoleh pekerjaan.
- Hak mendapat upah.
- Hak membuat perjanjian sewa-menyewa.
- Hak melakukan jual beli.
- Hak ikut serta dalam serikat buruh.

5. **Jawaban:**

Fasilitas umum merupakan sarana yang digunakan oleh banyak pihak. Fasilitas umum hendaknya dimanfaatkan secara bijak dengan menghormati antarpenggunanya. Gambar pada soal merupakan gambar bangku prioritas yang sering dijumpai di beberapa kendaraan umum. Apabila melihat rambu-rambu bangku prioritas, hendaknya kita memberikan perlakuan secara khusus, baik kepada orang lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun ibu-ibu yang membawa anak. Perlakuan khusus tersebut merupakan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terhindar dari perilaku yang mengancam keselamatan maupun kesehatan.

6. **Jawaban:**

Kasus pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan dapat diartikan sebagai pelanggaran HAM yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain. Pelanggaran HAM berat, yaitu pencabutan dan pelanggaran secara sengaja dan melawan hukum terhadap hak-hak dasar kemanusiaan.

7. **Jawaban:**

Hak sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi dan dijaga dengan baik oleh semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Saling menghormati hak setiap orang merupakan bentuk penjagaan terhadap hak agar tercipta kehidupan yang harmonis. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban setiap orang yang diatur dalam konstitusi negara tepatnya pasal 28J. Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

8. **Jawaban:**

Muatan materi hak asasi manusia dalam mata pelajaran PPKn akan memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait hak dan kewajiban

anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, serta pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM. Setelah peserta didik memahami hak asasi manusia, diharapkan peserta didik dapat saling menghormati hak dan kewajiban asasi setiap orang.

9. **Jawaban:**

Komnas HAM bersifat mandiri, artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada lembaga lain. Komnas HAM memiliki kedudukan yang setingkat dengan lembaga lain. Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya secara mandiri berkaitan dengan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

10. **Jawaban:**

Pelanggaran HAM akan diadili melalui lima tahapan berikut.

- Tahap Penangkapan**  
Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Tahap Penahanan**  
Tahap ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Tahap Penyelidikan**  
Tahap ini dilakukan untuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak pengadu, korban, pihak yang diadukan, atau saksi untuk diminta dan didengar keterangannya.
- Tahap Penyidikan**  
Tahap ini merupakan proses mencari bukti dan tersangkanya. Proses ini akan dihentikan setelah jaksa agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Apabila proses penghentian ini tidak diterima oleh pihak korban, mereka berhak mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya.
- Tahap Penuntutan**  
Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada jaksa agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat.



## BAB II

# Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

### Pendalaman Materi

#### A. Penerapan Sistem Demokrasi

### Uji Kompetensi 1

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono membagi pengertian demokrasi menjadi dua ukuran, yaitu ukuran normatif dan ukuran demokrasi yang mapan. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 3). Angka 2) merupakan pengertian demokrasi menurut Affan Gaffar, sedangkan angka 4) merupakan pengertian demokrasi menurut Miriam Budiardjo.

2. **Jawaban: c**

Dalam pembuatan kebijakan negara, mayoritas negara di dunia menggunakan sistem demokrasi tidak langsung/perwakilan. Faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan sistem demokrasi perwakilan adalah banyaknya warga negara dan luasnya wilayah negara.

3. **Jawaban: b**

Salah satu ciri demokrasi langsung adalah memberikan pendapat atau suara secara langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan. Keterlibatan rakyat berpengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Contoh demokrasi langsung di lingkungan masyarakat adalah pemilihan ketua karang taruna.

4. **Jawaban: d**

Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi perwakilan yaitu pemilihan umum anggota DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD berkedudukan sebagai wakil rakyat Indonesia yang memiliki legitimasi dari rakyat untuk menduduki jabatan parlemen dalam pemerintahan.

5. **Jawaban: e**

Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Pembatasan-pembatasan kekuasaan tersebut terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem demokrasi ini dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi telah menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem demokrasi konstitusional sangat menjunjung hak asasi manusia.

6. **Jawaban: a**

Pelaksanaan pemilu yang bebas dan *fair* menunjukkan kualitas demokrasi. Hal tersebut terlihat pada informasi soal yang menunjukkan kebebasan memilih parpol dan bebas memberikan mandat kepresidenan kepada calon yang akan dipilih.

7. **Jawaban: d**

Dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ada lembaga perwakilan yang menampung aspirasi rakyat yang disebut parlemen. Para calon anggota legislatif bersaing dengan berpatokan pada ideologi setiap partai dan menjanjikan terpenuhinya kebutuhan atau kepentingan konstituennya. Itulah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung.

8. **Jawaban: c**

Pemilihan umum bertujuan memilih wakil rakyat. Wakil rakyat yang terpilih akan menduduki kursi pemerintahan dan menggantikan wakil rakyat sebelumnya. Dengan demikian, otomatis terjadi pergantian pimpinan secara teratur (dalam konteks soal lima tahunan).

9. **Jawaban: d**

Wacana pada soal menggambarkan negara dengan pemerintahan otoriter. Dalam pemerintahan otoriter, pemerintahan dipegang oleh satu orang dan wewenang yang diberikan tidak terbatas sehingga pemimpin berlaku sesuai kehendak sendiri.

10. **Jawaban: a**

Negara yang mengaku sebagai negara demokratis harus memiliki ciri-ciri fundamental pemerintahan demokratis. Salah satu ciri fundamental pemerintahan adalah kemerdekaan setiap warga negara. Kemerdekaan warga negara yang dimaksud adalah kemerdekaan alami atau biasa disebut hak asasi manusia (HAM), seperti hak memilih, hak berpendapat, hak beragama, dan hak kebebasan berkumpul.

## B. Uraian

1. **Jawaban:**

Perbedaan pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln dan Affan Gaffar sebagai berikut.

- Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika, berpendapat demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Affan Gaffar, seorang pakar ilmu politik berpendapat bahwa demokrasi terbagi dalam dua hal, yakni demokrasi normatif dan demokrasi empiris. Demokrasi normatif ialah suatu demokrasi yang umumnya diwujudkan

oleh negara-negara. Demokrasi empiris ialah sebuah demokrasi yang wujudnya hanya ada di dunia politik.

2. **Jawaban:**

Demokrasi perwakilan adalah suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilih melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

3. **Jawaban:**

Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik. Akan tetapi, dalam bidang ekonomi demokrasi formal memegang asas persaingan bebas. Demokrasi formal ini dianut oleh banyak negara di Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, demokrasi formal sering disebut demokrasi Barat atau liberal.

4. **Jawaban:**

Perbedaan demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat sebagai berikut.

- Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Pembatasan-pembatasan kekuasaan tersebut terdapat dalam konstitusi.
- Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah sistem demokrasi yang didasari paham *marxisme-komunisme*. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial sehingga tercipta kesamarataan.

5. **Jawaban:**

Kesetaraan merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnik, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen, seperti Indonesia yang sangat multietnik, multibahasa, multidaerah, dan multi-agama.

## B. Sistem Demokrasi Pancasila

### Uji Kompetensi 2

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Kedudukan Indonesia sebagai negara demokrasi dikukuhkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar." Berdasarkan ketentuan tersebut secara normatif Indonesia merupakan negara demokrasi.

2. **Jawaban: e**

Salah satu pilar demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Prinsip demokrasi tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara tidak dipusatkan pada pemerintah pusat saja, tetapi sebagian diserahkan pada pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat serta pembatasan kekuasaan presiden. Melalui peraturan pemerintah daerah, daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

3. **Jawaban: c**

Demokrasi yang berkeadilan sosial adalah demokrasi mengenai hubungan antarwarga negara atau antarmasyarakat. Penyelesaian perlu dilakukan agar semua warga negara merasakan kemerdekaan yang sama. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas dengan berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

4. **Jawaban: c**

Idris Israil dalam bukunya berjudul *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan* mengungkapkan ciri-ciri demokrasi Pancasila Indonesia sebagai berikut.

- 1) Kedaulatan ada di tangan rakyat.
- 2) Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong.
- 3) Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 4) Tidak mengenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
- 5) Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
- 6) Menghargai hak asasi manusia.
- 7) Ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga tinggi negara.
- 8) Tidak mendukung adanya demonstrasi maupun pemogokan karena menimbulkan kerugian.
- 9) Tidak menganut sistem monopartai atau partai tunggal.
- 10) Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil.
- 11) Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- 12) Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

5. **Jawaban: d**

Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Rumusan singkat demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan asas kekeluargaan dalam bermasyarakat.

**Jawaban: b**

Cerita pada soal menunjukkan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” Walaupun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi negara, setiap orang perlu menghormati hak-hak orang lain serta berpendapat dengan sopan. Hasil keputusan bersama juga harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua anggota musyawarah.

**7. Jawaban: c**

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia.

8. **Jawaban:** d

Warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang. Dalam menyampaikan pendapat harus sesuai aturan yang berlaku. Penyampaian pendapat yang baik dapat dilakukan dengan melapor minimal 3 × 24 jam di kepolisian sebelum demonstrasi, menyampaikan kritik dan pemikiran melalui surat kabar, dan melakukan unjuk rasa di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang.

**9. Jawaban: b**

Salah satu asas demokrasi Pancasila adalah asas musyawarah. Dalam menjalankan asas musyawarah harus dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati, mementingkan kepentingan bersama, dan tidak memaksakan kehendak. Wacana tersebut merupakan penerapan asas musyawarah yaitu saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

10. **Jawaban: b**

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia. Salah satu fungsi tersebut adalah menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. Penyaluran hak pilih yang dilakukan oleh warga negara adalah wujud dari fungsi demokrasi Pancasila.

## B. Uraian

**1. Jawaban:**

Demokrasi Pancasila menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**2. Jawaban:**

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

**3. Jawaban:**

Ada empat makna penting yang terkandung dalam demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum (*rule of law*). *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugaltugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

**4. Jawaban:**

Fungsi demokrasi Pancasila sebagai berikut.

- a. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, dan duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
- b. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia.

- c. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional.
- d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila.
- e. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara.
- f. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.



#### **Jawaban:**

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila berperan penting dalam aspek kehidupan warga negara Indonesia. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara.

## **Pendalaman Materi**

### **C. Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia**

#### **Uji Kompetensi 3**

##### **A. Pilihan Ganda**

##### **1. Jawaban: a**

Periode 1945–1949 merupakan periode atau masa pemerintahan revolusi kemerdekaan pada periode tersebut. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Partai politik berkembang dengan cepat. Fungsi yang diperankan partai politik adalah memenangi revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan antipenjajahan. Pada periode ini pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Meskipun tidak banyak dicatat sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi, periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar terkait demokrasi di antaranya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh dan terbentuknya sejumlah partai politik melalui maklumat wakil presiden. Partai politik kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

##### **2. Jawaban: a**

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945–1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini karena pemerintah bersama rakyat harus

memusatkan seluruh energinya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara.

##### **3. Jawaban: a**

Ciri demokrasi liberal sebagai berikut.

- 1) Kondisi negara labil karena sering terjadi pergantian kabinet.
- 2) Kehidupan demokrasi terlihat dengan keberhasilan pemilu I (1955).
- 3) Penerapan demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer.

Penyederhanaan partai politik yang hanya tiga dan penerapan asas demokrasi dengan musyawarah mufakat merupakan ciri demokrasi Pancasila.

##### **4. Jawaban: b**

Dalam demokrasi liberal, kebebasan individu lebih diutamakan atau lebih ditonjolkan. Oleh karena itu, penerapan demokrasi liberal bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

##### **5. Jawaban: e**

Pada masa demokrasi parlementer semua elemen demokrasi dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia seperti berikut.

- 1) Parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
- 2) Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi.
- 3) Kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.

- 4) Pada umumnya masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali meskipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya secara maksimal.

6. **Jawaban: c**

Tindakan MPRS yang dianggap menyimpang dari UUD 1945 sebagai berikut.

- 1) Mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- 2) Menjadikan pidato Presiden Soekarno "manifesto politik" sebagai GBHN.

Adapun pernyataan pada angka 2) dan 3) merupakan tindakan korektif pemerintah Orde Baru terhadap pemerintahan Orde Lama. Tindakan korektif tersebut sebagai berikut.

- 1) Ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno dibatalkan.
- 2) DPR GR diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi membantu pemerintah.
- 3) Golongan Karya dan ABRI diberi landasan konstitusional yang lebih formal.

7. **Jawaban: b**

Ciri-ciri periode demokrasi terpimpin sebagai berikut.

- 1) Dominasi kekuasaan presiden.
- 2) Peran partai politik dibatasi.
- 3) Peran militer semakin kuat.
- 4) Berkembangnya komunisme.
- 5) Anti kebebasan pers.
- 6) Sentralisasi pada figur presiden.

Penerapan demokrasi liberal dengan sistem parlemen adalah ciri demokrasi liberal sedangkan penerapan asas demokrasi berlandaskan musyawarah mufakat merupakan ciri demokrasi Pancasila.

8. **Jawaban: d**

Pemilihan umum Indonesia 1955 sering dikatakan sebagai pemilu paling demokratis. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

9. **Jawaban: e**

Ir. Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada 5 Juli 1959 pukul 17.00. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut.

- 1) Pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955.
- 2) Pemberlakuan kembali UUD 1945.
- 3) Tidak berlakunya UUDS 1950.
- 4) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

10. **Jawaban: d**

Alasan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut.

- 1) Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar.
- 2) Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri.
- 3) Situasi politik yang kacau.

11. **Jawaban: e**

Setelah pemilihan umum 1971 pemerintah berusaha menyederhanakan partai politik. Penyederhanaan partai politik baru terealisasi pada tahun 1973. Pada tahun 1973 partai politik di Indonesia berjumlah tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

12. **Jawaban: e**

Pada masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya sehingga menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

13. **Jawaban: a**

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soeharto berusaha menciptakan stabilitas di bidang politik. Usaha tersebut antara lain menyederhanakan partai-partai politik, mengadakan pemilu, dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

14. **Jawaban: a**

UUD NRI Tahun 1945 pertama kali diamandemen pada masa Reformasi. Dalam kurun waktu 1999–2002, UUD NRI Tahun 1945 mengalami empat perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR.

- 1) Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14–21 Oktober 1999.
- 2) Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7–18 Agustus 2000.
- 3) Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1–9 November 2001.
- 4) Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1–11 Agustus 2002.

15. **Jawaban: c**

Setelah dilantik menjadi presiden, langkah yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi, seperti penghapusan dwifungsi ABRI. Fungsi sosial politik ABRI (sekarang Tentara Nasional Indonesia atau TNI) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI.

16. **Jawaban: d**

Kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi mengalami kemajuan. Salah satu buktinya adalah kebebasan warga negara dalam menjalankan kehidupan sangat terjamin. Kebebasan warga negara tersebut seperti kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau pikirannya dijamin secara konstitusional. Dalam pasal 28 UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

17. **Jawaban: e**

Salah satu indikator sebuah negara demokratis yaitu akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalani.

18. **Jawaban: c**

Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis jika memenuhi indikator-indikator yang dikemukakan oleh Afan Gaffar, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pelaksanaan pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Manusia memiliki hak dasar yang dijamin oleh undang-undang. Dalam negara demokratis setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta menikmati pers yang bebas.

19. **Jawaban: c**

Salah satu indikator suatu pemerintahan demokratis menurut Afan Gaffar adalah rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.

20. **Jawaban: c**

Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibedakan dan memperoleh akses serta kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan di depan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

## B. Uraian

1. **Jawaban:**

Dalam pelaksanaan demokrasi dipimpin, banyak terjadi penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti berikut.

- a. Sebagai akibat DPR menolak RAPBN yang diajukan presiden pada tahun 1960 dengan serta-merta DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan oleh presiden. Padahal, menurut penjelasan UUD NRI 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa "kedudukan DPR adalah kuat. Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden".

b. MPRS telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 Bab III pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

2. **Jawaban:**

Konsep awal demokrasi dipimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi, oleh Presiden Ir. Soekarno konsep demokrasi dipimpin ditafsirkan lain, yaitu dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno sendiri. Oleh karena itu, muncul istilah "Pemimpin Besar Revolusi" bagi Presiden Ir. Soekarno. Dengan demikian, demokrasi dipimpin oleh Ir. Soekarno ditafsirkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno selaku pemimpin besar revolusi.

3. **Jawaban:**

Pemilu tahun 1955 disebut pemilu paling demokratis karena beberapa faktor seperti berikut.

- Pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
- Kompetisi antarpartai politik berjalan sangat intensif.
- Partai-partai politik dapat mengajukan nominasi calonnya dengan bebas.

- Kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih.
- Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut.

4. **Jawaban:**

Pada umumnya kabinet dalam masa sebelum pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan. Pergantian kabinet yang sering dilakukan ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik karena pemerintah tidak mendapat kesempatan melaksanakan programnya.

5. **Jawaban:**

Kehidupan berdemokrasi di Indonesia mengalami kemajuan pada era reformasi. Salah satu buktinya adalah kebebasan warga negara dalam menjalankan kehidupan sangat terjamin. Kebebasan warga negara tersebut seperti kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapat atau pikirannya dijamin secara konstitusional. Kebebasan warga negara diatur dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

## Pendalaman Materi

### D. Membangun Kehidupan Demokratis Sesuai UUD NRI Tahun 1945

#### Uji Kompetensi 4

##### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Semua pilihan menunjukkan arti penting kehidupan demokratis. Akan tetapi, pilihan yang sesuai dengan informasi pada soal adalah pilihan **d**. Aksi mahasiswa yang membubarkan diri secara tertib setelah berorasi merupakan wujud kebebasan yang bertanggung jawab.

2. **Jawaban: b**

Ketentuan-ketentuan pada KUHP menunjukkan persamaan di muka hukum. Artinya, sanksi berupa hukuman penjara dan denda akan dijatuhkan kepada semua orang yang melakukan tindak pidana. Pemberian hukuman tidak memandang orang kaya atau miskin, maupun pejabat atau rakyat biasa. Apabila telah memenuhi unsur melanggar ketentuan-ketentuan KUHP, setiap orang akan dikenai sanksi yang sama. Di sinilah letak persamaan di depan hukum.



**3. Jawaban: e**

Pilihan jawaban **a–e** menunjukkan arti penting kehidupan demokratis. Akan tetapi, yang sesuai dengan informasi pada soal adalah pilihan **e**. Distribusi pendapatan secara adil melalui bantuan langsung tunai (BLT) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin.

**4. Jawaban: d**

Kelima perilaku pada soal mencerminkan nilai demokrasi. Akan tetapi, perilaku demokratis di lingkungan bangsa dan negara hanya ditunjukkan oleh angka **3)** dan **4)**. Perilaku pada angka **1)** mencerminkan nilai demokrasi di lingkungan keluarga, perilaku pada angka **2)** mencerminkan nilai demokrasi di lingkungan sekolah, dan perilaku pada angka **5)** mencerminkan nilai demokrasi di lingkungan masyarakat.

**5. Jawaban: e**

Pilihan **a–e** adalah perilaku yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Meskipun demikian, jawaban yang sesuai wacana pada soal adalah pilihan **e**. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan merupakan upaya dalam bernegosiasi.

**6. Jawaban: c**

Musyawarah untuk mufakat merupakan metode paling baik untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah adalah metode paling baik karena keputusan tidak diambil dari mayoritas atau minoritas, tetapi dari keputusan bersama dan kehendak bersama (mufakat).

**7. Jawaban: c**

Pemilihan umum merupakan mekanisme pengambilan keputusan dengan cara demokratis. Memilih mekanisme pemilihan umum dalam pengambilan keputusan berarti membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Dengan demikian, kegiatan pemilu yang dilakukan karang taruna mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal.

**8. Jawaban: b**

Suatu persoalan akan mudah terpecahkan dengan musyawarah sehingga akan tercapai keputusan atau kata sepakat. Manfaat yang diperoleh jika

menyelesaikan masalah secara musyawarah sebagai berikut.

- 1) Adanya kebersamaan.
- 2) Masalah dapat cepat terpecahkan.
- 3) Hasil keputusan menguntungkan semua pihak.
- 4) Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan.
- 5) Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda.

**9. Jawaban: a**

Gambar tersebut menunjukkan aksi demonstrasi atau protes terhadap kenaikan harga BBM. Pernyataan protes terhadap kebijakan kenaikan harga BBM adalah bagian dari proses demokrasi. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah adalah bentuk partisipasi yang diperlukan oleh negara demokrasi.

**10. Jawaban: a**

Dalam negara demokrasi diperlukan kerja sama dan iktikad baik antarwarga masyarakat. Warga masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada warga lainnya menunjukkan penerapan nilai-nilai demokrasi tidak berjalan dengan baik.

## B. Uraian

**1. Jawaban:**

Kebebasan yang bertanggung jawab berarti kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Sebagai contoh, mahasiswa yang melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

**2. Jawaban:**

Membayar pajak adalah kewajiban warga negara, sedangkan menuntut jalan dengan kondisi baik adalah hak warga negara. Dalam informasi pada soal, masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak baru menuntut hak perbaikan jalan. Jadi, perilaku mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam informasi tersebut adalah menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban.

3. **Jawaban:**

Contoh perilaku menegakkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masyarakat sebagai berikut.

- Memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa.
- Melaksanakan hasil keputusan musyawarah tingkat RT atau desa.
- Ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Ikut serta dalam kegiatan karang taruna.



**Jawaban:**

Sumpah Pemuda 1928 merupakan ikrar para pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras. Seluruh bangsa Indonesia

bertekad bersatu mengusir penjajah. Apabila dikaitkan dengan norma demokrasi menurut Nurcholish Madjid, ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan kesadaran akan pluralisme sehingga keberagaman menjadi perekat persatuan dan kesatuan.

5. **Jawaban:**

Penerapan kebebasan berkelompok dalam nilai-nilai demokrasi di Indonesia sebagai berikut.

- Ketika banjir melanda suatu daerah, upaya penyelamatan dan pemberian bantuan dilakukan secara berkelompok.
- Pemilihan presiden memerlukan keterlibatan partai politik sebagai kelompok untuk mengumpulkan dukungan maupun dana berkampanye.

## Penilaian Harian

### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Demokrasi konstitusional merupakan bentuk gagasan pemerintahan demokratis yang membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan dalam konstitusi negara. Dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional pemerintah tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan sangat menjunjung hak asasi manusia.

2. **Jawaban: a**

Dilihat dari titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk sebagai berikut.

- Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
- Demokrasi materiel, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

- 3) Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan materiel.

Pilihan angka **4)** dan **5)** merupakan bentuk demokrasi berdasarkan ideologi.

3. **Jawaban: a**

Negara otoriter adalah negara yang dijalankan oleh seorang diktator. Salah satu cirinya pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan memperkuat kekuasaan pemerintah seperti pada pilihan **a**. Adapun pilihan **b–e** merupakan ciri negara demokratis.

4. **Jawaban: e**

Informasi pada soal berisi tentang berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia. Dengan demikian, informasi tersebut menunjukkan pelaksanaan terhadap demokrasi konstitusional karena salah satu ciri demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

5. **Jawaban: a**

Negara yang mengaku sebagai negara demokratis harus memiliki ciri-ciri fundamental pemerintahan demokratis. Salah satu ciri fundamental pemerintahan adalah kemerdekaan setiap

warga negara. Kemerdekaan warga negara yang dimaksud adalah kemerdekaan alami atau biasa disebut hak asasi manusia (HAM). Di dalamnya terdapat hak memilih, hak berpendapat, hak beragama, dan hak kebebasan berkumpul.

6. **Jawaban: d**

Prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sudah berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.
- 7) Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan.

7. **Jawaban: d**

Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi dengan ciri memberikan suara atau pendapat secara langsung. Dalam sistem ini setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Contoh demokrasi langsung di sekolah adalah pemilihan ketua OSIS.

8. **Jawaban: c**

Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

- 1) Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang membebaskan manusia dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan dan paksaan.
- 2) Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia setinggi-tingginya, di atas kepentingan umum, dan didasarkan pada kebebasan atau individualisme.

9. **Jawaban: b**

Wacana pada soal berisi tentang pentingnya memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat demi terwujudnya keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

10. **Jawaban: e**

Indonesia merupakan negara berdaulat dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan arah bangsa ini melalui media-media demokratis yang tersedia. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan salah satu media demokratis. Dalam pemilu masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun.

11. **Jawaban: c**

Robert A. Dahl mengemukakan tujuh prinsip suatu negara dapat disebut sebagai negara demokratis sebagai berikut.

- 1) Pejabat yang dipilih.
- 2) Pemilihan (umum) yang bebas dan *fair*.
- 3) Hak pilih yang mencakup semua.
- 4) Hak untuk menjadi calon suatu jabatan.
- 5) Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan.
- 6) Informasi alternatif.
- 7) Kebebasan membentuk asosiasi.

12. **Jawaban: a**

Paham demokrasi Pancasila pada dasarnya menjamin bahwa rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan nasib dirinya sendiri, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial.

13. **Jawaban: e**

Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Secara mendalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Makna semboyan tersebut sesuai ciri-ciri demokrasi, yaitu adanya pengakuan terhadap perbedaan.

14. **Jawaban: c**

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila hanya dilaksanakan di negara Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945.

15. **Jawaban: e**

Demokrasi dengan kecerdasan merupakan salah satu pilar demokrasi konstitusional. Demokrasi dengan kecerdasan yaitu, demokrasi diselenggarakan sesuai UUD NRI Tahun 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan akal, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

16. **Jawaban: d**

Menurut Alamudi, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki saka guru demokrasi antara lain kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, dan adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

17. **Jawaban: c**

Kata kunci untuk menjawab soal ini adalah perbudakan dan diskriminasi. Perbudakan dan diskriminasi merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus perbudakan dan diskriminasi menunjukkan penyimpangan terhadap salah satu dari sepuluh pilar demokrasi menurut Ahmad Sanusi, yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia pada pilihan c.

18. **Jawaban: d**

Pada masa demokrasi terpimpin terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah seperti terbatasnya peran partai politik dan pers. Demokrasi terpimpin merupakan puncak dari semangat kebebasan anti pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberedel seperti, *Harian Abadi* dari Masyumi dan *Harian Pedoman* dari Partai Sosialis Indonesia.

19. **Jawaban: c**

Presiden pertama masa reformasi adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai aspirasi politiknya. Hal ini menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam partai politik. Oleh karena itu,

diberlakukan sistem multipartai dalam pemilu. Jumlah partai pada awal masa reformasi adalah 48 partai.

20. **Jawaban: b**

Pada masa reformasi terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi, misalnya adanya jaminan penegakan hak asasi manusia dan dicabutnya larangan etnik Tionghoa untuk berpartisipasi dalam politik dan budaya. Berkat kebijakan-kebijakan tersebut, maka tumbuh subur lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan. Etnik Tionghoa mulai dapat berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

21. **Jawaban: e**

Tuntutan yang diperinci pada soal merupakan tuntutan reformasi yang disuarakan masyarakat mengiringi berakhirnya Orde Baru dan memasuki periode reformasi.

22. **Jawaban: d**

Nilai-nilai yang semestinya melandasi pemerintahan demokratis sebagai berikut.

- 1) Menjamin perubahan masyarakat secara damai.
- 2) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- 3) Membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan sesedikit mungkin.
- 4) Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
- 5) Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.
- 7) Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan.

Adapun pilihan a, b, c, dan e merupakan penghambat proses demokrasi dalam negara.

23. **Jawaban: c**

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999–2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 agar mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

24. **Jawaban: e**

Penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti berikut.

- 1) Bersedia mengakui kesalahan yang telah diperbuat.
- 2) Kesiadaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- 3) Menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain.
- 4) Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi.

Adapun pilihan **a–d** menunjukkan penerapan budaya demokrasi di lingkungan negara.

**25. Jawaban: d**

Sikap yang terperinci pada soal dapat dijumpai dalam kegiatan musyawarah. Dalam musyawarah keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan tidak diambil berdasarkan suara mayoritas atau minoritas, pendapat paling baik dan paling bermanfaat bagi kepentingan umum akan menjadi keputusan bersama. Dengan demikian, dituntut kedewasaan, kerelaan, dan ketulusan untuk mendengar pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan menerima apabila pendapat pribadi tidak dijadikan keputusan bersama.

**26. Jawaban: c**

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis seperti hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Jika kita merasa bahwa kebijakan pemerintah belum sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat, kita bisa memberikan masukan dan pendapat kepada pemerintah dengan cara-cara yang sesuai aturan, misalnya menulis di surat kabar nasional.

**27. Jawaban: c**

Pergantian atas dasar keturunan atau dengan mengangkat dirinya sendiri ataupun melalui kudeta dianggap tidak wajar dalam demokrasi. Kudeta melanggar salah satu prinsip demokrasi yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

**28. Jawaban: b**

Prinsip bagi suatu negara demokratis sebagai berikut.

- 1) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Contoh penerapannya tidak mudah terpengaruh kemajuan teknologi.

- 2) Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Contoh penerapannya melaksanakan perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai mufakat.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Contoh penerapannya mengikuti pemilihan umum secara tertib.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Contoh penerapannya kampanye politik secara tertib.
- 5) Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Contoh penerapannya musyawarah desa yang menampung berbagai macam pendapat.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan. Contoh penerapannya tidak membedakan status sosial antarwarga.

**29. Jawaban: d**

Kelima perilaku pada soal mencerminkan nilai demokrasi. Akan tetapi, perilaku demokratis di lingkungan masyarakat hanya ditunjukkan oleh angka **3)** dan **4)**. Perilaku pada angka **1)**, **2)**, dan **5)** mencerminkan nilai demokrasi di lingkungan bangsa dan negara.

**30. Jawaban: a**

Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Wujud perilaku demokrasi dalam lingkungan negara sebagai berikut.

- 1) Ikut dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen.
- 2) Memberikan masukan atas pembuatan kebijakan publik.
- 3) Mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- 4) Ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai politik.

**31. Jawaban: d**

Manfaat demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis sebagai berikut.

- 1) Kesetaraan sebagai warga negara.
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.
- 3) Pluralisme dan kompromi.
- 4) Menjamin hak-hak dasar.
- 5) Pembaruan kehidupan sosial.

Adapun pernyataan pada angka **1)** dan **4)** bukan merupakan manfaat demokrasi. Angka **1)** merupakan ciri pemerintah otoriter. Angka **4)** merupakan ciri pemerintah liberal.

32. **Jawaban: e**

Norma demokrasi tidak menghendaki seseorang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu tidak boleh bertentangan dengan norma apa pun. Pilihan **a–e** menunjukkan cara untuk mendapatkan sesuatu. Akan tetapi, hanya pilihan **e** yang menunjukkan cara yang benar dalam mencapai tujuan.

33. **Jawaban: c**

Informasi pada soal menunjukkan peranan tenaga kerja perempuan dalam mengangkat derajat bangsa. Informasi tersebut sekaligus menjadi bukti kesetaraan gender bahwa tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menempati posisi terhormat untuk mengangkat derajat bangsa, kaum perempuan juga memiliki hak yang sama. Ketentuan ini dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

34. **Jawaban: c**

Dalam pemilu terdapat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penerapan sistem multipartai inilah yang menunjukkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan.

35. **Jawaban: c**

Menyalurkan aspirasi merupakan hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, pelaksanaan hak atau kebebasan dilaksanakan sesuai peraturan dan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Adapun menyalurkan aspirasi melalui kolom opini pada media cetak merupakan wujud tanggung jawab karena media cetak merupakan salah satu sarana yang tepat dan sesuai aturan dalam penyaluran aspirasi.

36. **Jawaban: a**

Menurut Alamudi suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki saka guru demokrasi yaitu kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan hak asasi manusia; pemilihan yang bebas dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintahan secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

37. **Jawaban: c**

Setiap pengambilan keputusan dalam melaksanakan musyawarah harus sesuai dengan akal sehat dan sesuai hati nurani agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan menggunakan akal sehat akan menghasilkan keputusan yang bermutu sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun orang lain.

38. **Jawaban: e**

Semangat musyawarah menghendaki adanya kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kalah suara. Oleh karena itu, semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan atau pendapat, baik dari individu maupun kelompok.

39. **Jawaban: a**

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Partisipasi dapat diberikan melalui beberapa bentuk, seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah, serta mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari pemilihan lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai sistem pemilihan yang berlaku.

40. **Jawaban: d**

Rasa saling percaya antarkelompok masyarakat merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antarkelompok masyarakat akan terganggu. Rasa percaya ini akan semakin diperlukan sejalan dengan semakin kompleksnya persoalan bangsa.

## B. Uraian

**Jawaban:**

Wacana pada soal menunjukkan bahwa Yunani Kuno melaksanakan sistem demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan bentuk sistem politik dengan hak pembuatan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga

negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana dengan jumlah penduduk sekira 300.000 dalam satu negara kota.

2. **Jawaban:**

Tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan sikap demokratis pada masa reformasi seperti berikut.

- a. Masih terjadi banyak kekerasan saat pergantian pimpinan seperti tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat.
- c. Masih banyak pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
- d. Masih banyak kasus pelanggaran HAM.
- d. Pendidikan politik rakyat yang masih rendah.
- e. Masih ada diskriminasi dalam pengambilan putusan.

3. **Jawaban:**

Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.

4. **Jawaban:**

Contoh perilaku menegakkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah sebagai berikut.

- a. Menyukseskan pemilihan ketua OSIS.
- b. Mematuhi peraturan sekolah.
- c. Menghormati Bapak/Ibu Guru.
- d. Menghargai teman yang sedang mengemukakan pendapat.



**Jawaban:**

Wacana pada soal berisi tentang pentingnya mengedepankan kebebasan yang diakui dan dipakai warga negara. Kebebasan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Contoh kebebasan warga negara yang diakui

negara seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul atau berkelompok, serta berserikat.

6. **Jawaban:**

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie muncul dua indikator pelaksanaan demokrasi Indonesia sebagai berikut.

- a. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilihan umum tahun 1999. Dalam hal ini Presiden Habibie membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.

7. **Jawaban:**

Menurut Azyumardi Azra, langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar. *Pertama*, reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis.

8. **Jawaban:**

Wacana pada soal menunjukkan salah satu indikator suatu pemerintahan yang demokratis yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Menurut Afan Gaffar salah satu indikator suatu pemerintahan itu demokratis atau tidak adalah rekrutmen politik yang terbuka. Menurut Afan Gaffar untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.

9. **Jawaban:**

Bentuk partisipasi politik sebagai berikut.

- a. Pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden.
- b. Hubungan dengan pejabat pemerintah.
- c. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah.

- d. Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari pemilihan lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai sistem pemilihan yang berlaku.

10. **Jawaban:**

Persamaan di muka hukum berarti seluruh warga negara mendapat perlakuan sama tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih dalam hukum. Contoh seorang pencuri, baik itu pejabat maupun rakyat biasa mendapat hukuman yang sama sesuai ketentuan hukum.



# Penilaian Tengah Semester 1

## A. Pilihan Ganda

### 1. Jawaban: d

Kata "Setiap orang" pada ketentuan pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 berarti berlaku umum bagi siapa pun, tanpa terkecuali. Tiap-tiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **d**. Adapun sifat-sifat HAM lainnya sebagai berikut.

- 1) Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Hal ini karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
- 2) Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.

### 2. Jawaban: a

Hak asasi manusia memiliki sifat universal, utuh, hakiki, dan permanen. Sifat-sifat hak asasi manusia tersebut tecermin pada pilihan **a–e** sebagai berikut.

- 1) Universal tecermin pada pilihan **d** dan **e**.
  - 2) Utuh tecermin pada pilihan **b**.
  - 3) Hakiki tecermin pada pilihan **a**.
  - 4) Permanen tecermin pada pilihan **c**.
- Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **a**.

### 3. Jawaban: d

Pengadilan HAM *Ad Hoc* berwenang memeriksa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan. Singkatnya cari peristiwa pelanggaran HAM dalam opsi yang terjadi sebelum tahun 2000. Dengan demikian, kasus yang dapat diperiksa melalui pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Peristiwa bom Bali I, II, dan pembunuhan aktivis bukan merupakan pelanggaran HAM, melainkan tindak kejahatan terorisme dan pembunuhan. Peristiwa Abepura merupakan pelanggaran HAM yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan sehingga pemeriksaan atas kasus tersebut menjadi kewenangan pengadilan HAM.

### 4. Jawaban: e

Pilihan **a–e** merupakan hak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Akan tetapi, yang paling sesuai dengan gambar adalah pilihan **e**. Gambar pada soal adalah kegiatan pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu jalan menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan. Melalui pemilihan umum warga negara dapat memilih dan dipilih untuk turut serta dalam pemerintahan berdasarkan ketentuan undang-undang.

### 5. Jawaban: b

Informasi pada soal tentang keterwakilan wanita dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak wanita terutama dalam hal politik. Seorang wanita diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi wakil rakyat.

### 6. Jawaban: b

Pernyataan yang menunjukkan hak sosial dan budaya ditunjukkan oleh pilihan **b**. Belajar di sekolah termasuk hak sosial dan budaya yang

dijamin dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun pilihan **a** dan **c** merupakan hak asasi bidang ekonomi, pilihan **d** hak asasi bidang politik, dan pilihan **e** berkaitan dengan hak asasi bidang hukum.



**7. Jawaban: d**

Faktor eksternal menjadi kunci menjawab soal ini. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Sikap egois, kesadaran hukum, dan sikap tidak toleran merupakan faktor dari dalam. Otomatis pilihan **a**, **b**, dan **c** kurang tepat. Pilihan **d** dan **e** merupakan faktor eksternal. Akan tetapi, mana yang sesuai dengan konteks soal? Konteks soal menginformasikan seseorang yang memanfaatkan koneksi untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Padahal anak yang bersangkutan belum memenuhi syarat. Melalui koneksi tersebut si anak dapat masuk ke sekolah yang dituju. Ada penyalahgunaan kekuasaan di sini. Penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh oknum yang dengan kekuasaannya dapat memasukkan anak yang belum memenuhi kriteria ke sekolah dasar yang dimaksud. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **d**.

**8. Jawaban: a**

Faktor internal menjadi kunci menjawab soal ini. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor internal ditunjukkan oleh pilihan **a**, **b**, dan **c**. Selanjutnya, sesuaikan dengan konteks soal. Pada cerita yang disajikan pemuda merelakan tempat duduknya untuk sang kakek. Pemuda memikirkan orang lain (kakek) bukan hanya dirinya sendiri. Artinya, pemuda tersebut telah mampu mengalahkan egonya (sikap egoisnya). Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan **a**.

**9. Jawaban: d**

Holocaust merupakan pemusnahan massal kaum Yahudi oleh Nazi di Jerman. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM kejahatan tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM berat yang disebut genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, dan agama. Adapun kriteria kejahatan genosida dijelaskan lebih terperinci dalam undang-undang tersebut.

**10. Jawaban: d**

Kejahatan genosida merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kewenangan mengadili kasus Trisakti ada pada pengadilan HAM *Ad Hoc* karena kasus tersebut terjadi sebelum tahun 2000. Jika kejahatan tersebut terjadi sesudah tahun 2000, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan HAM.

**11. Jawaban: e**

Semua tindakan melawan hukum dan melanggar hak orang lain termasuk pelanggaran HAM. Akan tetapi, hanya pelanggaran HAM berat yang dapat disidangkan dalam pengadilan HAM. Kelima pilihan pada soal merupakan contoh pelanggaran HAM. Akan tetapi, pelanggaran HAM berat ditunjukkan oleh pilihan **e**.



**12. Jawaban: d**

Kriteria pada soal menunjukkan pelanggaran HAM berat, yaitu genosida. Apabila kejahatan genosida terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan, wewenang mengadili ada pada pengadilan HAM *Ad Hoc*. Akan tetapi, apabila kejahatan genosida terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan, wewenang mengadili ada pada pengadilan HAM. Dengan demikian, pengadilan yang berhak mengadili adalah pengadilan HAM *Ad Hoc*.

**13. Jawaban: b**

Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Kejahatan genosida merupakan kejahatan paling besar terhadap kemanusiaan. Pilihan yang sesuai pengertian genosida adalah **b**.

**14. Jawaban: a**

Bekerja dan mendapatkan gaji sesuai posisi di perusahaan mengandung kesesuaian dengan ketentuan pasal 28D ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".



**15. Jawaban: d**

Kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut tidak tergolong pelanggaran HAM berat seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Kasus ini

adalah pelanggaran HAM yang masuk ranah pidana, yaitu pidana pembunuhan. Dengan demikian, kasus ini diadili di pengadilan umum dengan mekanisme pidana.

16. **Jawaban: d**

Pengadilan HAM, baik permanen maupun *Ad Hoc* dikhususkan untuk memeriksa pelanggaran HAM berat yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM dikhususkan untuk mengadili pelanggaran HAM setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Dengan demikian, kasus Abepura yang paling sesuai. Kasus bom Bali, kasus bom Thamrin, kasus penculikan anak, dan kasus pencurian kakao bukan merupakan kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan, melainkan tindak pidana yang menjadi kewenangan pengadilan dengan mekanisme pidana.

17. **Jawaban: e**

Pengadilan HAM *Ad Hoc* merupakan pengadilan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu atau sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kasus pelanggaran HAM yang sesuai mekanisme pengadilan *Ad Hoc* adalah kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984.

18. **Jawaban: d**

Pasangan antara kasus dan pengadilan yang tepat sebagai berikut.

	Kasus	Pengadilan
1)	DOM Aceh	Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>
2)	Peristiwa Abepura, Papua	Pengadilan HAM
3)	Peristiwa Bom Bali I dan II	Pengadilan negeri
4)	Penyerbuan kantor PDI 27 Juli 1996	Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>
5)	Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984	Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>

19. **Jawaban: e**

Pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor internal penyebabnya adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang dimiliki seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

20. **Jawaban: e**

Langkah tepat yang harus diambil apabila menjumpai kasus pelanggaran HAM adalah melapor kepada Komnas HAM. Selanjutnya, Komnas HAM akan segera menindaklanjuti laporan Anda dan melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum dalam penanganan kasus pelanggaran HAM.

21. **Jawaban: a**

Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan perwakilan seperti ditunjukkan oleh pilihan **a**. Adapun pilihan **b** adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, pilihan **c**, **d**, dan **e** merupakan penggolongan demokrasi berdasarkan titik perhatiannya.

22. **Jawaban: e**

Prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sudah berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.

23. **Jawaban: e**

Pilihan **a–e** adalah prinsip negara demokrasi menurut Robert A. Dahl. Akan tetapi, yang paling sesuai adalah pilihan **e**. Pemilihan umum yang diselenggarakan merupakan mekanisme memilih wakil rakyat oleh rakyat. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat berdasarkan informasi adalah pejabat yang dipilih rakyat, yaitu pilihan **e**.

24. **Jawaban: a**

Ketentuan yang harus diketahui terlebih dahulu adalah mengapa Yunani dapat melaksanakan *direct democracy*? Yunani merupakan negara kota yang berpenduduk sekira 300.000 jiwa. Sangat memungkinkan bagi negara Yunani untuk menghimpun rakyatnya dalam satu tempat untuk dimintai pertimbangan tentang penyelenggaraan negara. Sangat bertolak belakang dengan kondisi

Indonesia yang padat penduduk dengan wilayah yang terdiri atas beribu pulau. Dengan demikian, jelas bahwa demokrasi langsung seperti zaman Yunani tidak dapat diterapkan di Indonesia karena penduduknya padat dan permasalahan yang semakin kompleks.

**25. Jawaban: d**

Kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi mengalami kemajuan. Salah satu buktinya adalah kebebasan warga negara dalam menjalankan kehidupan sangat terjamin. Salah satunya kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ruang tanya jawab yang disediakan laman pemerintah bagi rakyat merupakan bukti bahwa kebebasan warga negara dalam kehidupan terjamin.

**26. Jawaban: d**

Indonesia menganut prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.

- 1) Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Demokrasi dengan kecerdasan.
- 3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- 4) Demokrasi dengan *rule of law*.
- 5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.

**27. Jawaban: c**

Mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem demokrasi perwakilan/tidak langsung dalam pembuatan kebijakan negara. Ada dua faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung, yaitu banyaknya jumlah warga negara dan wilayah negara yang luas.

**28. Jawaban: d**

Demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ada lima nilai pada sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Unjuk rasa merupakan cara masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi apabila unjuk rasa itu berujung pada perbuatan anarki seperti merusak fasilitas umum dan pembakaran ban, hal ini tidak dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut membawa kerugian bagi bangsa dan negara, serta bertentangan dengan nilai kerakyatan.

**29. Jawaban: a**

Dalam konsep negara demokrasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Aspirasi rakyat menjadi prioritas dalam pembuatan kebijaksanaan sehingga upaya menyampaikan kehendak rakyat seperti yang dilakukan komunitas antikorupsi merupakan salah satu wujud pemerintahan dari rakyat.

**30. Jawaban: c**

Keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat merupakan bukti kesetaraan gender. Artinya, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik. Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak sama di depan hukum karena laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses dalam politik, sosial, dan ekonomi.

**31. Jawaban: d**

Pilihan pada nomor **1)–4)** semuanya mengandung aspirasi. Akan tetapi, jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan **d**. Transparansi alokasi dana pendidikan merupakan aspirasi membangun dan bermanfaat bagi berbagai kalangan. Transparansi ini akan mencegah timbulnya berbagai masalah seperti praktik korupsi dan kesalahpahaman antara rakyat dan pemerintah mengenai alokasi dana pendidikan. Aspirasi dalam aksi kamisan juga patut diakomodasi sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap penegakan dan penghargaan HAM.

**32. Jawaban: c**

Inti pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah pemegang kedaulatan adalah rakyat. Adapun pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia berdasarkan pasal tersebut adalah rakyat sebagaimana dalam pilihan **c**.

**33. Jawaban: c**

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung. Dalam pemilu warga negara berhak memilih wakil-wakil yang nantinya akan duduk dalam pemerintahan secara langsung.

**34. Jawaban: c**

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki kecenderungan untuk hidup secara berkelompok. Melalui kelompoknya, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks

demokrasi, kodrat manusia sebagai makhluk sosial diakomodasi dengan jaminan kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat.

**35. Jawaban: e**

Pergantian kekuasaan merupakan salah satu prinsip demokrasi. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi terjadinya penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.

**36. Jawaban: a**

Sistem demokrasi Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pelaksanaannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terdapat dua prinsip dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu prinsip negara hukum (*rechtsstaats*) dan sistem konstitusional.

**37. Jawaban: a**

Apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat dan tidak bisa diselesaikan atau mengalami jalan buntu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan voting. Jadi, voting merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara yang terbanyak.

**38. Jawaban: e**

Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pandangan terhadap hal yang menjadi topik pembicaraan merupakan bentuk pelaksanaan sikap demokratis. Dengan memberikan kesempatan tersebut, seorang pemimpin telah memberikan hak berbicara di depan publik kepada orang lain.

**39. Jawaban: b**

Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan wujud kehidupan demokratis. Perbedaan pendapat dalam rapat merupakan hal biasa. Apabila dalam sebuah rapat terjadi perdebatan langkah bijaksana

yang harus dilakukan adalah menyampaikan usul logis dan baik sebagai solusi dari perdebatan tersebut. Dengan demikian, proses musyawarah akan berjalan tertib.

**40. Jawaban: c**

Musyawarah merupakan bagian dari penegakan nilai demokrasi. Dalam musyawarah terhadap nilai demokrasi seperti adanya persamaan, mengutamakan persatuan, dan pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku demokratis di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh pilihan **c**.

**B. Uraian**

**1. Jawaban:**

Kalimat "diamini oleh negara-negara di dunia" menunjukkan keuniversalan. Dengan demikian, sifat HAM pada pernyataan tersebut adalah universal. Prinsip universal menegaskan bahwa HAM berlaku secara keseluruhan di mana pun seseorang berada. Suatu hak tidak dapat diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pasal 1 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Selain bersifat universal, HAM memiliki sifat-sifat berikut.

- Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Hal ini karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
- Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.
- Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.

**2. Jawaban:**

Hak asasi manusia menurut sila kedua berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan mengakui semua manusia sebagai makhluk sosial yang berkonsekuensi pada kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah. Apabila nilai-nilai luhur dalam sila ini diamalkan akan timbul sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa satu sama lain.

3. **Jawaban:**

Bukti bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mendukung upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia adalah dijabarkannya ketentuan tentang HAM dalam pasal 28A–28J hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945.

4. **Jawaban:**

Kegiatan pada gambar adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menjual dan membeli merupakan hak dalam bidang ekonomi.



5. **Jawaban:**

Jawaban peserta didik akan bervariasi. Adapun contoh jawaban yang dapat dikembangkan Bapak/Ibu Guru adalah menggunakan media sosial pada gambar untuk mengampanyekan dukungan terhadap penegakan HAM. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk membentuk komunitas pendukung HAM atau komunitas belajar yang mengkaji perkembangan HAM.

6. **Jawaban:**

Sebuah negara disebut demokratis ketika telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati.

7. **Jawaban:**

Demokrasi langsung seperti zaman Yunani tidak bisa diterapkan di Indonesia karena penduduk Indonesia sangat banyak, tidak mungkin jika dikumpulkan dalam satu tempat dalam rangka mengemukakan pendapat secara langsung.

8. **Jawaban:**

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 pada soal merupakan ketentuan yang telah diamandemen. Amandemen dilaksanakan karena tuntutan reformasi. Dengan demikian, periodisasi demokrasi sesuai ketentuan tersebut adalah demokrasi pada masa reformasi.



9. **Jawaban:**

Pelaksanaan sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari pemilihan umum, rakyat, dan legitimasi kekuasaan. Ketiganya mempunyai hubungan yang erat dalam pembentukan sistem demokrasi. Pemilihan umum merupakan gerbang awal pemberian legitimasi kekuasaan yang diberikan rakyat kepada orang-orang tertentu yang mendapat kepercayaan dari rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum yang dijalankan secara jujur dan adil akan menciptakan sistem demokrasi yang baik.

10. **Jawaban:**

Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam lingkungan keluarga sebagai berikut.

- Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- Memecahkan masalah dengan cara musyawarah mufakat.
- Menghargai anggota keluarga yang sedang mengemukakan pendapat.
- Menghargai perbedaan pendapat.
- Tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga lainnya.

## BAB III

# Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

### Pendalaman Materi

#### A. Sistem Hukum Nasional

### Uji Kompetensi 1

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan dijadikan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, mengingat kedudukannya sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

2. **Jawaban: c**

Hukum memiliki sifat mengatur, memaksa dan mengikat. Hukum bersifat memaksa menegaskan bahwa hukum dibuat dengan sungguh-sungguh disertai sanksi yang tegas agar masyarakat patuh terhadap aturan hukum. Terdapat suatu peraturan tentang undang-undang antikorupsi. Jika ada orang yang melanggar undang-undang tersebut, ia akan dijatuhi sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

3. **Jawaban: c**

Hukum nasional merupakan hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku di wilayah negara tersebut. Sebagai contoh penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Hukum tersebut hanya berlaku di perairan Indonesia.

4. **Jawaban: c**

Hukum berdasarkan tempat berlakunya terdiri atas hukum nasional dan hukum internasional. Jika seorang terbukti membawa barang terlarang di wilayah Indonesia maka orang tersebut dapat dikenakan hukum nasional dan akan diproses di Indonesia. Dalam proses peradilan orang tersebut menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia meskipun ia berstatus sebagai warga negara asing.

5. **Jawaban: b**

Hukum dilihat dari bentuknya dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pidato kenegaraan yang dilakukan setiap tanggal 16 Agustus termasuk dalam hukum tidak tertulis. Pelaksanakan pidato kenegaraan tersebut merupakan contoh bentuk hukum tidak tertulis dalam kegiatan kenegaraan yaitu konvensi.

6. **Jawaban: b**

Perkara utang piutang merupakan perkara hukum privat. Jadi, dalam proses penyelesaiannya menggunakan gugatan secara perdata karena kasus tersebut merupakan kasus antara individu dengan individu yang menyangkut kepentingan personal.

7. **Jawaban: e**

Pencabutan perda pada kutipan berita pada soal terjadi karena perda tersebut dianggap bertentangan dengan muatan materi. Dalam tata

urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda lebih rendah dari undang-undang. Jadi perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

8. **Jawaban: a**

Unsur-unsur hukum terdiri atas suatu aturan tentang tingkah laku manusia, berisi perintah dan larangan, memuat aturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi tegas dan nyata. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 2).

9. **Jawaban: e**

Pernyataan yang sesuai antara sumber hukum dan pengertiannya ditunjukkan oleh angka 3) dan 5). Pengertian pada angka 1), 2), dan 4) seharusnya sebagai berikut.

- 1) Peraturan yang dibuat DPR dengan persetujuan presiden.
- 2) Peraturan tidak tertulis yang dilakukan berulang-ulang dan sama.
- 4) Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan dalam memutus perkara yang sama dan belum diatur dalam undang-undang.

10. **Jawaban: b**

Pernyataan yang sesuai dengan ciri hukum privat ditunjukkan oleh angka 1), 3), dan 5). Pernyataan angka 2) dan 4) merupakan ciri-ciri hukum publik.

11. **Jawaban: c**

Kebiasaan merupakan jenis peraturan tidak tertulis dan tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh masyarakat. Kebiasaan meliputi hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

12. **Jawaban: d**

KUHP dan KUH Perdata merupakan peraturan hukum tertulis. Berdasarkan penggolongan hukumnya, hukum tertulis termasuk hukum berdasarkan bentuknya.

13. **Jawaban: b**

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah

pengganti undang-undang

- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan presiden
- 6) Peraturan daerah provinsi
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota

Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

14. **Jawaban: b**

Bagan pada soal menggambarkan contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tidak tertulis ialah pelaksanaan pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia setiap 16 Agustus di depan sidang DPR dan DPD. Pidato tersebut bersifat informatif.

15. **Jawaban: d**

Sumber hukum yang digunakan dalam persidangan tersebut ialah doktrin. Doktrin merupakan pendapat ahli dalam memberikan pandangannya terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi pada persidangan di pengadilan. Pendapat ahli tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

## B. Uraian

1. **Jawaban:**

Sistem hukum, baik perdata maupun pidana yang sekarang masih berlaku di Indonesia merupakan sistem hukum yang mendapat pengaruh dari hukum Barat. Fakta sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda menjadikan produk hukum yang berlaku merupakan terjemahan dari hukum Belanda. Pengaruh hukum Eropa Kontinental ditunjukkan dengan berlakunya undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara pengaruh hukum *Anglo Saxon* ditunjukkan dengan penggunaan yurisprudensi dalam memutus suatu perkara yang belum diatur oleh undang-undang.

**Jawaban:**

Berdasarkan waktu berlakunya hukum dibedakan atas dua jenis sebagai berikut.

- a) *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini dan pada suatu tempat dan waktu tertentu.



- b) *Ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang (RUU).

**3. Jawaban:**

Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terletak di atasnya harus dilakukan pencabutan terhadap peraturan tersebut. Dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung, terkait pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai. Permohonan pengajuan uji materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

**4. Jawaban:**

Proses peradilan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI di pengadilan militer termasuk penggolongan hukum berdasarkan luas berlakunya. Penggolongan hukum tersebut termasuk dalam hukum khusus. Hukum khusus hanya berlaku bagi orang-orang tertentu dan hanya untuk mengadili perkara-perkara tertentu.

**5. Jawaban:**

Seorang hakim dapat menggunakan yurisprudensi dalam memutus suatu perkara. Tindakan tersebut dilakukan karena perkara yang hendak diputus belum diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim menggunakan putusan hakim terdahulu dengan kasus serupa untuk dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara hukum yang sedang dihadapi.

## Pendalaman Materi

### B. Sistem Peradilan Nasional

#### Uji Kompetensi 2

##### A. Pilihan Ganda

**1. Jawaban: b**

Gambar pada soal menunjukkan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di provinsi sehingga daerah hukumnya berada di wilayah provinsi.

**2. Jawaban: c**

Kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lembaga peradilan adalah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan proses penyelesaian suatu perkara sesuai bidang pengadilannya. Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sebuah perkara yang berhubungan dengan kepegawaian pada tingkat pertama.

**3. Jawaban: c**

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ialah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mengajukan tiga anggota hakim konstitusi, dan memberi pertimbangan kepada presiden tentang

pemberian grasi dan rehabilitasi. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **A2**, **B2**, dan **B3**.

**4. Jawaban: b**

Peradilan umum berwenang untuk mengadili perkara yang bersifat umum, baik pidana maupun perdata yang dapat digunakan masyarakat umum dalam mencari keadilan. Perkara pencurian sepeda motor tersebut termasuk perkara pidana karena telah mengganggu kepentingan umum dan merugikan orang lain. Proses peradilan perkara tersebut dilakukan di peradilan umum.

**5. Jawaban: d**

Gambar pada soal menunjukkan peristiwa pengusuran lahan. Kasus pengusuran lahan termasuk dalam kasus sengketa tata usaha negara. Sebagai pengadilan tingkat pertama, kasus tersebut dapat terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Berdasarkan kompetensi absolut kasus tersebut dapat terlebih dahulu diselesaikan di wilayah kabupaten/kota.

6. **Jawaban: b**

Gambar pada soal merupakan gambar tanah wakaf. Jika terjadi sengketa berkaitan dengan tanah wakaf, sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi perkawinan, warisan, sedekah, infak, hibah dan ekonomi syariat.



7. **Jawaban: c**

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Dalam tingkatan peradilan, Mahkamah Agung memegang kedudukan sebagai lembaga peradilan tingkat akhir atau tingkat kasasi. Kasasi dapat diajukan apabila pihak yang berperkara merasa putusan banding dari pengadilan tinggi kurang sesuai. Dalam tingkat kasasi suatu putusan dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- 1) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan dan mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan;
- 2) melampaui batas wewenang; serta
- 3) salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

8. **Jawaban: a**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menangani kasus sengketa hasil pemilihan umum, melakukan uji materiil undang-undang terhadap undang-undang dasar, membubarkan partai politik, dan mengajukan tiga hakim Mahkamah Agung.



9. **Jawaban: a**

Putusan perkara pada soal merupakan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tingkat pertama. Jika keluarga korban tidak dapat menerima putusan tersebut, keluarga korban dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Ketentuan tersebut berdasarkan tingkatan yang dimiliki oleh lembaga peradilan di Indonesia.

10. **Jawaban: b**

Dalam peradilan khusus diperlukan hakim *ad hoc*, yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam peradilan khusus. Hakim tersebut harus memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Hakim ini hanya bersifat sementara.

11. **Jawaban: d**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki wewenang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi meliputi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

12. **Jawaban: c**

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal permohonan grasi terhadap seorang narapidana. Dasar hukum ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

13. **Jawaban: c**

Gambar pada soal merupakan gambar pengadilan tinggi agama. Lembaga peradilan tersebut berwenang menangani perkara dalam tingkat banding yang berhubungan dengan orang-orang beragama Islam. Contoh perkaranya yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariat.

14. **Jawaban: a**

Kata kunci untuk menjawab soal tersebut adalah pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan tentang Komisi Yudisial. Bunyi pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

**15 Jawaban: e**

Kasus yang terjadi pada soal dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jika X merasa tidak menerima keputusan tersebut, ia dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Perkara yang dapat diajukan ke pengadilan ini seperti sengketa kepegawaian, sengketa lahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

**B. Uraian**

**1. Jawaban:**

Peradilan militer tinggi merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa sebagai berikut.

- Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas.
- Orang-orang yang oleh undang-undang dipersamakan dengan prajurit militer yang berpangkat mayor ke atas.
- Orang-orang yang oleh keputusan panglima TNI yang disetujui oleh Mahkamah Agung harus diadili di pengadilan militer tinggi.

**2. Jawaban:**

Mahkamah Agung berwenang:

- mengadili pada tingkat kasasi;
- menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- mengajukan tiga hakim konstitusi; serta
- memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi.

Mahkamah Konstitusi berwenang:

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;

- memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
- memutus pembubaran partai politik;
- memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan umum; serta
- memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang.

**3 Jawaban:**

Jika terdapat kelalaian terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, pihak yang terlibat dalam suatu perkara dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi. Jika putusan tersebut terbukti mengandung unsur kelalaian atau kesalahan dalam menetapkan undang-undang maka putusan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

**4. Jawaban:**

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika putusan pada pengadilan tingkat pertama kurang memuaskan ialah pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya banding pada pengadilan tinggi yang berkedudukan di provinsi untuk mendapatkan keadilan terhadap suatu perkara. Jika putusan banding masih dirasa kurang memuaskan, pihak yang berperkara tersebut dapat melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

**5 Jawaban:**

Hukum dan lembaga peradilan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Tidak adanya lembaga peradilan akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang melanggar hukum tidak akan mendapatkan sanksi sebab sanksi yang diperoleh bagi para pelanggar hukum didapat melalui lembaga peradilan. Masyarakat tidak memiliki wadah untuk mencari keadilan. Akibatnya, terjadi perilaku main hakim sendiri di lingkungan masyarakat karena tidak ada lembaga hukum yang memayunginya.

## C. Menunjukkan Perilaku Sesuai Hukum Nasional

### Uji Kompetensi 3

#### A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Perilaku taat hukum yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan seseorang memiliki kesadaran hukum. Sebagai contoh terbiasa mengenakan helm dan berhenti saat lampu merah menyala. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal untuk patuh terhadap hukum yang berlaku.

2. **Jawaban: e**

Korupsi tergolong tindakan pidana yang merugikan negara. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan terkena sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa kurungan penjara, denda, dan penyitaan harta benda.

3. **Jawaban: d**

Pemberian imbalan kepada pemilih pada waktu pemilu termasuk bentuk gratifikasi untuk mendulang hasil suara. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. **Jawaban: b**

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak. Pengenalan hukum dalam lingkungan keluarga dapat diawali dengan melakukan pengenalan tentang perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan aturan keluarga.

5. **Jawaban: c**

Perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum pada lingkungan masyarakat ditunjukkan dengan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan merupakan bentuk perilaku melanggar hukum. Membuang sampah pada tempatnya dilakukan untuk mencegah bencana banjir dan munculnya wabah penyakit yang dapat merugikan diri dan masyarakat pada umumnya.

6. **Jawaban: e**

Gambar pada soal menunjukkan aturan wajib belajar pukul 18.30–20.30. Aturan mengenai wajib belajar tersebut harus dipatuhi oleh warga masyarakat, termasuk warga lain yang berada di wilayah tersebut. Salah satu sikap kepatuhan adalah tidak menimbulkan kegaduhan ketika melintas di wilayah tersebut.



7. **Jawaban: e**

Kita telah mengetahui asas-asas pemilu. Dua di antaranya, yaitu bebas dan rahasia. Artinya, dalam memberikan suara kita bebas menentukan pilihan sesuai hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Pilihan kita juga dijamin kerahasiaannya. Jadi, berdasarkan cerita pada soal, kita sebaiknya memilih sesuai hati nurani tanpa memberi tahu Pak Roni tentang pilihan kita.



8. **Jawaban: a**

Wacana pada soal berisi tentang kesepakatan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua orang. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum karena telah disepakati di atas meterai dengan disaksikan oleh seorang advokat. Dengan demikian, orang yang melakukan sewa-menyewa tidak perlu khawatir jika salah satu pihak melakukan wanprestasi karena pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut di muka hukum dan dikenai sanksi hukum. Secara umum, hukum memiliki arti penting sebagai pelindung kepentingan antarwarga negara agar tidak berbenturan.

9. **Jawaban: e**

Sikap bertentangan dengan hukum yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di antaranya melakukan aksi separatisme, menyebarkan berita *hoax* atau berita bohong yang dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat, dan mendirikan organisasi dengan idealisme sendiri yang seharusnya sesuai dengan ideologi Pancasila.

Separatisme merupakan upaya pemisahan diri dari NKRI melalui perilaku/gerakan separatis, menyebarkan berita *hoax* dapat memicu terjadinya provokasi dan mengganti ideologi Pancasila sama saja dengan membubarkan NKRI.

10. **Jawaban: a**

Ayah Rian tidak memperbolehkan anaknya mengendarai sendiri sepeda motor ke sekolah karena Rian belum berusia tujuh belas tahun. Menurut hukum, Rian belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Itulah alasan tepat ayah Rian melarang Rian naik sepeda motor sendiri ke sekolah.

**B. Uraian**

**1. Jawaban:**

Perilaku pengendara sepeda motor seperti gambar pada soal melanggar hak pejalan kaki. Mereka menggunakan trotoar sebagai jalan pintas. Sikap yang sebaiknya dilakukan apabila menjumpai kejadian tersebut ialah menegur pengendara sepeda motor tersebut untuk kembali menggunakan jalan raya. Jika dirasa kurang efektif, Anda dapat meminta bantuan petugas lalu lintas untuk menegur pengendara sepeda motor tersebut.

2. **Jawaban:**

Perilaku sesuai hukum di lingkungan sekolah sebagai berikut.

- Berangkat sekolah tepat waktu.
- Menjaga ketenangan kelas.
- Mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan.

**3. Jawaban:**

Sebuah negara merdeka memerlukan hukum untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan warga negaranya. Hukum dalam suatu negara dibuat untuk menciptakan suasana dan keadaan yang tertib hukum, dan jauh dari kekacauan.

4. **Jawaban:**

Dalam wacana tersebut terdapat dua sanksi yang akan didapat oleh A. Sanksi tersebut sebagai berikut.

a. Sanksi Hukum

Norma hukum merupakan seperangkat kaidah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memberikan keterangan palsu untuk meringankan tersangka pada saat persidangan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Sanksi Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari dalam hati nurani manusia itu sendiri. A telah melanggar norma kesusilaan karena telah berbicara bohong. Sanksi dari norma kesusilaan berupa rasa bersalah dalam dirinya sendiri sehingga menimbulkan perasaan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

5. **Jawaban:**

Kutipan informasi pada soal tentang perilaku seorang mantan petinggi negara yang melakukan tindakan korupsi. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Mantan pejabat tersebut telah diproses dan dijatuhi vonis sesuai aturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan arti penting hukum, hukum memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Hukum tidak memihak golongan yang kuat saja, tetapi bagi semua kalangan. Walaupun yang melakukan perbuatan pidana dari kalangan pejabat, ia tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak akan runcing ke bawah dan tumpul ke atas.



**A. Pilihan Ganda**

**1. Jawaban: d**

Gambar pada soal menunjukkan pengendara sepeda motor berhenti tepat di belakang *zebra crossing*, saat lampu merah menyala. Peristiwa tersebut memperlihatkan tujuan hukum untuk menciptakan suasana tertib dalam masyarakat.

**2. Jawaban: b**

Tokoh dan pernyataan yang sesuai berkaitan dengan definisi hukum ditunjukkan oleh angka **1)** dan **3)**. Pernyataan pada angka **2)** dan **4)** salah karena seharusnya:

- Van Kan berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
- Leon Duguit berpendapat bahwa hukum merupakan suatu kaidah tentang tingkah laku anggota masyarakat, pada saat tertentu aturan tersebut diindahkan oleh masyarakat sebagai suatu jaminan kepentingan bersama, dan pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

**3. Jawaban: e**

Contoh hukum yang dicita-citakan ialah rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat menjadi undang-undang atau hukum positif jika telah mendapat persetujuan DPR bersama presiden yang kemudian diundangkan dalam lembaran negara.

**4. Jawaban: b**

Sistem hukum *Anglo Saxon* lebih menekankan pada sistem hukum tidak tertulis seperti yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Sementara itu, sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada sumber hukum tertulis, baik yang dikodifikasi maupun belum. Contoh hukum yang mendapat pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental ialah KUHP.

**5. Jawaban: c**

Kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dalam bentuk yang sama. Kebiasaan dijadikan sebagai sumber norma hukum dalam masyarakat karena masyarakat sangat membutuhkan peraturan tersebut. Keadaan tersebut terjadi akibat kekosongan hukum dalam masyarakat.

**6. Jawaban: a**

Alasan dasar yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan melanggar hukum disebabkan minimnya pengetahuan terhadap hukum. Melalui sosialisasi perilaku taat hukum masyarakat akan mengerti perilaku apa saja yang menurut undang-undang dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan menghindari perilaku kriminalitas. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **a**. Adapun pilihan **b–e** merupakan upaya represif.

**7. Jawaban: d**

Gambar pada soal menunjukkan pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara berwenang mengadili pada tingkat banding perkara tata usaha negara seperti sengketa kepegawaian dan sengketa kepemilikan lahan dengan badan usaha akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di provinsi.

**8. Jawaban: e**

Asas yang dianut dalam peradilan nasional ialah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses dalam peradilan nasional tidak berbelit-belit dan menggunakan biaya ringan.

**9. Jawaban: c**

Bagan pada soal merupakan bagan lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **c**.

10. **Jawaban: b**

Ahli memiliki tugas memberikan pandangan serta pertimbangan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Pendapat seorang ahli di persidangan disebut sebagai doktrin. Doktrin berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **b**.

11. **Jawaban: e**

Wacana pada soal merupakan contoh penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya terdiri atas hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif ialah hukum yang mengatur semua hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hukum subjektif ialah hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Jadi, wacana pada soal termasuk sebagai hukum subjektif.

12. **Jawaban: c**

Uji materiel yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.

**Jawaban: e**

Pak Rangga melakukan kasasi di Mahkamah Agung karena ia telah melakukan upaya hukum pada tingkat pertama dan tingkat banding. Pak Rangga menilai putusan yang dikeluarkan pada tingkat banding kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

14. **Jawaban: d**

Pernyataan yang sesuai ditunjukkan oleh angka **2)** dan **4)**. Pernyataan angka **1)** dan **3)** salah karena pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang bersifat umum. Perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan negeri seperti perkara perdata dan pidana. Perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan tata usaha negara ialah perkara yang disebabkan munculnya suatu keputusan tata usaha negara.

**15. Jawaban: d**

Penanganan perkara yang berhubungan dengan warisan dan wakaf menjadi wewenang pengadilan agama. Jalur hukum yang ditempuh untuk menghindari konflik dalam perkara warisan dan wakaf adalah mengajukan proses peradilan di pengadilan agama.

16. **Jawaban: b**

Wacana pada soal menunjuk pada peraturan daerah provinsi. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, peraturan daerah provinsi terletak di bawah peraturan presiden dan di atas peraturan daerah kabupaten/kota. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **b**.

17. **Jawaban: e**

Peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarkan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa ialah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan dapat langsung diberlakukan tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu.

18. **Jawaban: a**

Hukum privat yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarorang yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Contohnya, kitab undang-undang hukum dagang. Pernyataan angka **1)**, **2)**, dan **4)** termasuk ranah hukum privat yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Pernyataan angka **3)** dan **5)** termasuk ranah hukum publik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.

**Jawaban: b**

Adanya suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang menyebabkan kebingungan hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan sumber hukum yurisprudensi dalam memutus perkara tersebut.

20. **Jawaban: d**

Wiryono Kusumo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Pilihan **d** menunjukkan definisi hukum sebagaimana disampaikan Wiryono Kusumo.

21. **Jawaban: c**

Kegiatan ronda malam merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat. Kegiatan ronda malam dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan masyarakat.

22. **Jawaban: e**

Setiap pengendara sepeda motor wajib memiliki kesadaran hukum berlalu lintas. Kesadaran hukum pengendara sepeda motor dapat diwujudkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Kepatuhan lalu lintas antara lain membawa surat kelengkapan berkendara, mengenakan helm, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Apabila salah satu peraturan tersebut dilanggar, perbuatan tersebut dianggap sebagai perilaku bertentangan dengan hukum.

23. **Jawaban: e**

Menjauhi perilaku yang dilarang undang-undang merupakan contoh perilaku taat hukum. Perilaku taat hukum tecermin pada tindakan mematuhi peraturan, termasuk menjauhi larangan hukum.

24. **Jawaban: e**

Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara memiliki tiga sifat sebagai berikut.

- 1) Konkret, artinya keputusan tersebut dapat diwujudkan dan tidak bersifat abstrak. Contoh dari sifat keputusan tersebut ialah tentang pemberhentian seorang pegawai dan pengurusan lahan di wilayah tertentu.
- 2) Individual, artinya keputusan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat umum. Keputusan tersebut ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Dalam hal ini nama serta alamat yang dituju harus sesuai.
- 3) Final, artinya keputusan tersebut sudah pasti yang menimbulkan akibat hukum sehingga tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari pihak lain.

Jadi, jawaban yang benar ditunjukkan oleh pilihan e.

25. **Jawaban: a**

Perilaku sadar hukum merupakan suatu sikap memahami aturan yang berlaku dan menerapkan dalam kehidupan. Perilaku tersebut telah menjadi suatu kebiasaan. Sikap sadar hukum akan menciptakan lingkungan dan masyarakat yang tertib hukum.

26. **Jawaban: c**

Kepatuhan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar pribadi manusia. Contohnya pengaruh orang lain, lingkungan pergaulan, serta adanya sanksi bagi pelanggarnya. Perilaku Bu Ana mengendarai sepeda motor dengan mengenakan helm karena operasi lalu lintas di jalan merupakan faktor eksternal. Hal ini karena perilaku kepatuhan yang dilakukan Bu Ana dipengaruhi oleh adanya sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm.

27. **Jawaban: e**

Sebagai seorang yang sadar hukum, jika terjadi perilaku tindak pidana yang merugikan orang lain sebaiknya tidak main hakim sendiri. Negara kita adalah negara hukum. Sebaiknya, hakim segera melapor kepada pihak berwajib agar dapat dilakukan tindakan sesuai aturan hukum.

28. **Jawaban: e**

Gambar pada soal menunjukkan imbauan larangan membuang sampah di sungai. Tujuan imbauan tersebut ialah agar warga masyarakat tertib terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesadaran tidak membuang sampah di sungai sehingga menciptakan lingkungan yang bersih.

29. **Jawaban: a**

Gambar pada soal menunjukkan poster anti-narkotika. Sikap membentengi diri dari bahaya narkotika dapat dilakukan dengan cara berhati-hati dalam bergaul, memperkuat iman kita agar tidak terpengaruh dengan narkotika. Narkotika dapat menghancurkan kehidupan generasi muda sehingga faktor internal penting untuk diperkukuh.



30. **Jawaban: a**

Hukum berdasarkan luas berlakunya digolongkan menjadi hukum umum dan hukum khusus. Hukum khusus merupakan hukum yang diberlakukan hanya bagi orang-orang tertentu, seperti peradilan militer.

**B. Uraian**

**1. Jawaban:**

Kasus yang dialami oleh Pak Rudi termasuk kasus perdata. Perkara perdata merupakan perkara yang melibatkan perseorangan atau antarwarga negara. Dalam penggolongan hukum, kasus tersebut termasuk dalam penggolongan hukum berdasarkan isinya yang terdiri atas hukum privat dan hukum publik. Kasus tersebut merupakan kasus hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara.

**2. Jawaban:**

Hukum memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat karena jika tidak ada hukum, semua orang akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban manusia tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan terjadi kekacauan. Hukum memiliki sifat memaksa, bersedia atau tidak hukum wajib dipatuhi. Jika masyarakat sudah memiliki sikap sadar hukum, akan tercipta lingkungan yang tertib hukum.

**3. Jawaban:**

Menurut hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, undang-undang berada di atas peraturan daerah. Jika terdapat undang-undang yang muatannya berseberangan dengan peraturan daerah, tindakan yang dilakukan adalah tetap memberlakukan undang-undang tersebut dan mencabut peraturan daerahnya. Berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

**4. Jawaban:**

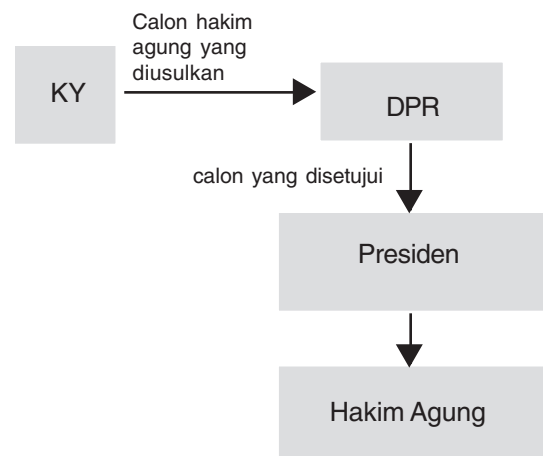
Gambar di atas merupakan gambar hutan Indonesia. Hutan Indonesia merupakan penyuplai oksigen terbesar sehingga dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sikap sadar hukum berkaitan dengan lingkungan hutan seperti berikut.

- Melakukan penebangan kayu dengan sistem tebang pilih dan menghindari perilaku eksploitasi hutan.
- Bagi para badan usaha, sebaiknya jika akan melakukan pembukaan lahan tidak dengan cara membakar hutan.
- Melakukan kegiatan reboisasi sebagai upaya pelestarian hutan.

Beberapa sikap di atas merupakan bagian dari sikap sadar hukum. Perbuatan seperti penebangan liar, *illegal logging* dan pembakaran hutan adalah sikap yang bertentangan dengan hukum dan merugikan banyak pihak.

**5. Jawaban:**

Skema usulan pengangkatan hakim agung sebagai berikut.



# Penilaian Akhir Semester 1

## A. Pilihlah jawaban yang tepat!

### 1. Jawaban: c

Sifat-sifat hak asasi manusia dapat diperinci sebagai berikut.

- 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Hal ini karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
- 3) Universal atau menyeluruh, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia, tanpa terkecuali.
- 4) Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.

### 2. Jawaban: d

Sifat-sifat hak asasi manusia dapat diperinci sebagai berikut.

- 1) Universal atau menyeluruh, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia, tanpa terkecuali.
- 2) Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Hal ini karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
- 3) Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.

- 4) Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.

### 3. Jawaban: c

Keragaman agama merupakan kenyataan yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Pasti dalam keragaman tersebut akan timbul persoalan. Oleh karena itu, masyarakat harus mengembangkan sikap yang mampu meredam permasalahan yang ada. Sikap tersebut adalah toleransi. Menerapkan sikap toleransi dapat menciptakan kerukunan. Selain itu, sikap toleransi merupakan wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia.

### 4. Jawaban: b

Kejahatan genosida merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kewenangan mengadili kasus ini ada pada pengadilan HAM karena kasus tersebut terjadi setelah tahun 2000. Jika kejahatan tersebut terjadi sebelum tahun 2000, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan HAM *Ad Hoc*.

### 5. Jawaban: e

Upaya represif atau penindakan dilakukan pemerintah setelah pelanggaran HAM terjadi. Upaya represif dilaksanakan dengan cara-cara berikut.

- 1) Menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM.
- 2) Menangani kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM, pengadilan HAM, dan pengadilan HAM *Ad Hoc*.
- 3) Melakukan pencarian data, informasi, dan fakta atas peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM.

6. **Jawaban: a**  
Hak beragama yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 membawa konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menjamin setiap pemeluk agama beribadat sesuai ajaran agamanya masing-masing. Pemerintah harus memberikan rasa nyaman kepada setiap pemeluk agama apabila mereka mau melaksanakan ibadah. Adapun masyarakat harus memeluk agama sesuai keyakinan dan menerapkan trikerukunan beragama.

7. **Jawaban: d**  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bersifat retroaktif, artinya undang-undang ini berlaku surut. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

8. **Jawaban: b**  
Faktor internal menjadi kunci menjawab soal ini. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor internal ditunjukkan oleh pilihan **a, b, dan c**. Selanjutnya, sesuaikan dengan konteks soal. Pihak yang menyalahgunakan kursi prioritas menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan. Tidak taat terhadap peraturan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **b**.

9. **Jawaban: c**  
Kelima kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, tidak semua dapat diadili melalui mekanisme pengadilan HAM. Kasus yang dapat diadili melalui mekanisme pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. Adapun kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dari kedua pengertian kejahatan HAM berat tersebut dapat diidentifikasi pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM dan pelanggaran HAM yang disidangkan melalui

pengadilan HAM biasa. Pilihan **a dan b** termasuk kejahatan genosida. Pilihan **d dan e** merupakan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pembunuhan aktivis HAM termasuk tindak kriminal yang dapat disidangkan melalui mekanisme pengadilan pidana.

10. **Jawaban: a**  
Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah pengadilan yang bersifat sementara. Artinya, pengadilan ini akan dibubarkan setelah selesai mengadili perkara HAM tertentu. Adapun pelanggaran HAM yang disidangkan adalah pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran berat masa lalu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 1999, yaitu sebelum disahkannya Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat dapat disidangkan melalui pengadilan HAM *Ad Hoc*. Jika pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran HAM masa lalu.

11. **Jawaban: c**  
Hak asasi ekonomi merupakan hak setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Melakukan perjanjian kontrak atau sewa-menyewa dengan pihak lain menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh hak asasi ekonomi. Selain itu, kebebasan mendapatkan pekerjaan yang layak dan melakukan utang piutang termasuk hak asasi ekonomi.

12. **Jawaban: e**  
Menghargai pendapat orang lain meskipun berseberangan dengan pendapat pribadi merupakan wujud dari penghargaan terhadap hak asasi manusia. Cukup dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap pendapat tersebut dan tidak memaksakan kehendak orang lain untuk selaras dengan diri kita merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sederhana.

13. **Jawaban: a**  
Nilai keadilan merujuk pada upaya memberikan hak sesuai porsinya kepada setiap orang. Dalam konteks kenegaraan, nilai keadilan senantiasa diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nilai keadilan dalam praktik demokrasi diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Kata "setiap orang" menjelaskan bahwa siapa pun berkesempatan menempati jabatan dalam pemerintahan.

14. **Jawaban: e**

Peristiwa tersebut adalah reformasi. Puluhan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR menuntut reformasi. Peristiwa tersebut terjadi pada 1998. Setelah peristiwa tersebut terjadi perombakan terhadap pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Dengan demikian, periode yang tepat ditunjukkan oleh pilihan e.

15. **Jawaban: d**

Pemberedelan dan sensor terhadap media massa merupakan indikator pembatasan kebebasan dan kemerdekaan masyarakat. Akibatnya, kontrol rakyat terhadap pemerintahan kurang. Tidak ada partisipasi masyarakat dalam pemerintahan jika kebebasan dan kemerdekaan berpendapat melalui media massa dibatasi. Oleh karena itu, pemerintahan Orde Baru belum bisa dikatakan demokratis.

16. **Jawaban: d**

Kunci menjawab soal ini adalah prinsip demokrasi, yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dari kelima pilihan tersebut yang menunjukkan jaminan hak adalah pilihan d. Hak mendapatkan pendidikan dijamin dalam pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hingga saat ini pemerintah terus meningkatkan pemerataan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

17. **Jawaban: e**

Keputusan bersama harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat dan keputusan bersama merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat, tanpa terkecuali.

18. **Jawaban: b**

Persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum merupakan salah satu prinsip demokrasi. Persamaan kedudukan di depan hukum dapat diwujudkan dengan sikap tegas aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran

hukum. Tidak ada pengecualian bagi pelanggar hukum. Semua memiliki kedudukan sama. Jika bersalah harus dihukum.

19. **Jawaban: b**

Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Demokrasi parlementer ditandai dengan kedudukan parlemen yang lebih tinggi/besar dibanding lembaga eksekutif. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya.

20. **Jawaban: b**

Hasil keputusan musyawarah maupun voting merupakan keputusan bersama yang harus ditaati oleh seluruh peserta musyawarah. Sebagai peserta musyawarah yang bertanggung jawab kita harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah maupun hasil voting dengan penuh tanggung jawab.

21. **Jawaban: b**

Salah satu perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah ikut serta dalam musyawarah. Dengan ikut serta dalam musyawarah berarti masyarakat ikut serta dalam upaya pembentukan watak dan nilai-nilai budaya demokratis.

22. **Jawaban: c**

Proses pendidikan politik yang dapat peserta didik lakukan adalah menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS merupakan bentuk aplikasi nyata pendidikan politik bagi peserta didik. Peserta didik bisa merasakan sendiri nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS.

23. **Jawaban: d**

Salah satu unsur hukum adalah bersifat mengikat dan memaksa. Daya ikat hukum ditunjukkan oleh sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan hukum. Orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum tidak dapat menolak untuk diadili atas ketidaktahuannya terhadap aturan hukum. Hal ini menunjukkan sifat memaksa dari hukum.

24. **Jawaban: d**

Pasangan yang tepat antara kriteria penggolongan hukum dan contohnya sebagai berikut.

	Penggolongan Hukum	Contoh
a.	Berdasarkan bentuknya	Hukum tertulis dan tidak tertulis
b.	Berdasarkan tempat berlakunya	Hukum lokal dan nasional
c.	Berdasarkan sumbernya	Undang-undang dan kebiasaan
d.	Berdasarkan wujudnya	Hukum objektif dan subjektif
e.	Berdasarkan isinya	Hukum privat dan publik

25. **Jawaban: b**

Salah satu sumber hukum formil yang diimplementasikan dalam berita tersebut adalah yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.

26. **Jawaban: c**

Tenggat waktu yang diberlakukan pada proses beracara pidana merupakan implementasi dari asas cepat dalam peradilan nasional. Tenggat waktu tersebut ditetapkan agar proses peradilan tidak ditunda-tunda dan berlarut-larut. Asas peradilan nasional lainnya mencakup asas sederhana dan biaya ringan.

27. **Jawaban: a**

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 wewenang menyelesaikan perselisihan tentang pemilihan umum ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun kewenangan MK lainnya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
- 3) memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

28. **Jawaban: b**

Berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP sanksi terhadap pelanggaran hukum terdiri atas sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok terdiri atas hukuman mati, penjara dan kurungan, serta denda. Sanksi tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman keputusan hakim.

29. **Jawaban: b**

Pilihan jawaban **a**, **b**, **c**, **d**, dan **e** menunjukkan perilaku patuh terhadap hukum. Akan tetapi yang sesuai lingkungan bangsa dan negara adalah mengenakan helm saat mengendarai motor.

30. **Jawaban: a**

Penasihat hukum merupakan orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi atau pemberian nasihat. Melalui konsultasi, WNA tersebut akan memperoleh gambaran tentang syarat dan ketentuan menjadi WNI. Informasi yang didapat melalui konsultasi tersebut diharapkan dapat membantu WNA dalam mengambil keputusan.

31. **Jawaban: a**

Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan presiden
- 6) Peraturan daerah provinsi
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota

32. **Jawaban: a**

Ketentuan pada soal merupakan isi pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, peraturan yang dimaksud adalah UUD NRI Tahun 1945.

33. **Jawaban: a**

Peraturan yang dimaksud berdasarkan ketentuan tersebut adalah UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan UUD NRI Tahun 1945 di atas ketetapan MPR.

34. **Jawaban: c**

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan presiden
- 6) Peraturan daerah provinsi
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota

35. **Jawaban: a**

Komponen sistem hukum dalam berita tersebut adalah komponen kultural atau budaya hukum. Dalam hal ini kepatuhan mengenakan helm standar. Budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

36. **Jawaban: a**

Budaya hukum masyarakat dikatakan tinggi jika masyarakat tidak mempunyai kecenderungan melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Sebaliknya, budaya hukum masyarakat dikatakan rendah jika masyarakat cenderung menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, budaya hukum masyarakat dalam berita tersebut tergolong rendah karena pelanggaran terhadap hukum (tidak mengenakan helm standar keselamatan) masih terjadi.

37. **Jawaban: e**

Berdasarkan bentuknya hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi atau dibukukan. Adapun hukum tidak tertulis di antaranya hukum adat dan kebiasaan ketatanegaraan. Pidato presiden setiap menjelang kemerdekaan merupakan contoh kebiasaan ketatanegaraan. Dengan demikian, pidato presiden tersebut merupakan hukum tidak tertulis.

38. **Jawaban: e**

Berdasarkan cara mempertahankannya hukum dapat digolongkan menjadi hukum materiel dan formil. Hukum materiel menitikberatkan pada aturan hukumnya, sedangkan hukum formil menitikberatkan pada cara mempertahankan aturan dalam hukum materiel tersebut dapat dilaksanakan dengan beracara, baik pidana maupun perdata seperti yang dilakukan Danang.

39. **Jawaban: b**

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang sedang berlaku. Hukum positif jika diikuti nama negara di belakangnya berarti hukum yang sedang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian, hukum positif Indonesia berarti hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

40. **Jawaban: c**

Keluarga merupakan lingkungan paling utama dalam penanaman kesadaran hukum. Pengenalan dan pengetahuan tentang hukum dapat ditanamkan sejak dini dalam keluarga melalui perbincangan ringan antaranggota keluarga. Dengan demikian, pengenalan dan pengetahuan tentang hukum diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum kepada setiap individu dalam keluarga sebagai landasan bersikap dalam berbagai lingkungan kehidupan.

**B. Uraian**

1. **Jawaban:**

Tidak setiap kasus pelanggaran HAM dapat disidangkan melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM *Ad Hoc*. Hanya pelanggaran HAM berat yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM *Ad Hoc*. Adapun pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan. Adapun pelanggaran HAM yang lain disidangkan melalui mekanisme pengadilan pidana.

2. **Jawaban:**

Pelanggaran HAM berat masa lalu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 1999, yaitu sebelum disahkannya Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM masa lalu disidangkan melalui pengadilan HAM *Ad Hoc*.

3. **Jawaban:**

Pada masa Orde Baru masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politik melalui Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Akan tetapi, dalam praktiknya terjadi penyimpangan, misalnya terdapat imbauan yang mengarahkan pegawai negeri sipil untuk memilih golongan tertentu. Imbauan tersebut menjadikan pemilu Orde Baru kurang mencerminkan asas bebas dalam pemilu.

4. **Jawaban:**

Indonesia dan berbagai negara di dunia meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan dengan melakukan pembatasan terhadap kekuasaan. Adapun mekanisme yang digunakan adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala mampu meminimalisasi penyelewengan yang disebabkan periode jabatan yang terlalu lama.

5. **Jawaban:**

Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Komponen struktural terdiri atas lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan penegak hukum, misalnya DPR dan aparat penegak hukum.



6. **Jawaban:**

Asas peradilan yang digunakan dalam ketentuan tersebut adalah asas biaya ringan. Asas biaya ringan artinya proses peradilan harus menekan seminimal mungkin biaya yang digunakan. Implementasi dari asas biaya ringan adalah pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu sesuai ketentuan dalam KUHP.

7. **Jawaban:**

Penggolongan hukum menurut wujudnya sebagai berikut.

- a. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum menitikberatkan pada substansi peraturannya. Hukum ini mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

8. **Jawaban:**

Tahap yang harus ditempuh setelah penuntutan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan memeriksa perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan dilaksanakan menurut ketentuan dalam undang-undang. Proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim bertindak sebagai pemimpin jalannya persidangan.

9. **Jawaban:**

Hukum pidana ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemaksaan yang khusus diancamkan kepada yang tidak menaati aturan-aturan hukum. Hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum formil karena hukum acara mengatur cara mempertahankan hukum materiel. Perbedaan antara keduanya adalah jika hukum pidana menitikberatkan pada teori, sedangkan praktik mempertahankan hukum pidana adalah dengan beracara pidana.

10. **Jawaban:**

Usaha yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum sebagai berikut.

- a. Mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Mendukung upaya alat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.
- c. Meningkatkan pemahaman hukum.

# Remedial Semester 1

## A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban merupakan amanat yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila . . . .
  - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b. kemanusiaan yang adil dan beradab
  - c. persatuan Indonesia
  - d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  - e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya . . . .
  - a. hak untuk hidup
  - b. hak atas rasa aman
  - c. hak atas kesejahteraan
  - d. hak mengembangkan diri
  - e. hak memperoleh keadilan
3. Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan masyarakat adalah . . . .
  - a. menjenguk tetangga yang sakit
  - b. mendengarkan nasihat orang tua
  - c. memperhatikan guru ketika sedang mengajar
  - d. melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal
  - e. menghormati anggota keluarga yang beribadah
4. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah . . . .
  - a. penyalahgunaan teknologi
  - b. penyalahgunaan kekuasaan
  - c. sikap tidak toleran terhadap orang lain
  - d. ketidaktegasan aparat penegak hukum
  - e. kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
5. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diadili melalui . . . .
  - a. pengadilan HAM
  - b. pengadilan tinggi
  - c. pengadilan militer
  - d. pengadilan negeri
  - e. pengadilan HAM *Ad Hoc*



6. Perhatikan instrumen HAM internasional dan ratifikasi berikut!

No.	Instrumen HAM Internasional	Ratifikasi
1)	Konvensi Internasional terhadap Anti- <i>apartheid</i> dalam Olahraga	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
2)	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
3)	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998
4)	Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993
5)	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

Pasangan yang sesuai antara instrumen HAM internasional dan ratifikasinya ditunjukkan oleh angka . . . .

- 1), 2), dan 3)
- 1), 2), dan 4)
- 2), 3), dan 4)
- 2), 3), dan 5)
- 3), 4), dan 5)

7. Peran Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya adalah . . . .

- menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dan komunitas korban dengan menitikberatkan pada kepentingan korban
- merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia
- mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya
- melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

8. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan pada pilihan . . . .

- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
- Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

9. Bentuk perilaku yang dapat membangun kehidupan harmonis dengan menegakkan HAM di lingkungan bangsa dan negara adalah . . . .

- menyayangi adik atau kakak
- menghormati guru dan karyawan
- berpartisipasi dalam pemilihan umum
- mengikuti kegiatan kemasyarakatan
- mengembangkan sikap saling menghormati antartetangga

10. Pemeriksaan pada tingkat banding atau kasasi dilakukan paling lama . . . .

- 20 hari
- 30 hari
- 60 hari
- 90 hari
- 180 hari

11. Bertindak semena-mena tanpa memperhatikan hak orang lain menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Tindakan semena-mena tersebut merupakan indikator . . . .
  - a. penyalahgunaan teknologi
  - b. penyalahgunaan kekuasaan
  - c. ketidaktegasan aparat hukum
  - d. kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
  - e. rendahnya tingkat kesadaran seseorang terhadap HAM
12. Kasus pelanggaran HAM kerusuhan Timor Timur pascaajak pendapatan pada 1999 berhasil disidangkan melalui pengadilan HAM *Ad Hoc* Jakarta pada 2002 hingga 2003 karena . . . .
  - a. termasuk kejahatan koneksitas
  - b. termasuk pelanggaran HAM berat
  - c. termasuk dalam tindak pidana militer
  - d. belum diatur dalam undang-undang saat itu
  - e. terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan
13. Sistem demokrasi ini mengutamakan kebebasan berpikir dan dianut oleh banyak negara di Eropa dan Amerika. Berdasarkan titik perhatiannya ciri-ciri tersebut menunjukkan demokrasi . . . .
  - a. rakyat
  - b. formal
  - c. materiel
  - d. campuran
  - e. konstitusional
14. Perhatikan macam-macam demokrasi berikut!
  - 1) Demokrasi campuran
  - 2) Demokrasi materiel
  - 3) Demokrasi langsung
  - 4) Demokrasi perwakilan

Berdasarkan prinsip penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi dua macam yang ditunjukkan oleh angka . . . .

  - a. 1) dan 2)
  - b. 1) dan 3)
  - c. 2) dan 3)
  - d. 2) dan 4)
  - e. 3) dan 4)
15. Pemilihan (umum) yang bebas dan *fair*, kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan, serta kebebasan membentuk asosiasi merupakan beberapa prinsip negara demokratis menurut pendapat . . . .
  - a. Sidney Hook
  - b. Henry B. Mayo
  - c. Robert A. Dahl
  - d. Miriam Budiardjo
  - e. Riswanda Imawan
16. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula soal mengorganisasi kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Akan tetapi, demokrasi yang menuntut untuk membangun *welfare state*. Pernyataan tersebut menunjukkan arti . . . .
  - a. demokrasi dengan kemakmuran
  - b. demokrasi yang berkeadilan sosial
  - c. demokrasi dengan otonomi daerah
  - d. demokrasi yang berkedaulatan rakyat
  - e. demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
17. Pemerintah dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengembalikan yang diperolehnya kepada rakyat. Pernyataan tersebut sesuai nilai-nilai demokrasi Pancasila, yaitu nilai . . . .
  - a. kebebasan berpartisipasi
  - b. kesetaraan antarwarga
  - c. kesetaraan gender
  - d. kedaulatan rakyat
  - e. kerja sama
18. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang sama untuk mengisi suatu jabatan politik dan melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan indikator sistem pemerintahan dikatakan demokratis. Indikator yang dimaksud adalah . . . .
  - a. akuntabilitas
  - b. pemilihan umum
  - c. rotasi kekuasaan
  - d. pemenuhan hak-hak dasar
  - e. rekrutmen politik yang terbuka
19. Warga negara dapat ikut serta dalam memberikan masukan kepada pemerintah tentang suatu kebijakan sehingga kebijakan pemerintah mencerminkan aspirasi dari warga negara. Pernyataan tersebut menunjukkan prinsip negara demokratis, yaitu prinsip . . . .
  - a. supremasi hukum
  - b. pemilihan umum berkala
  - c. tingkat persamaan di antara warga negara
  - d. keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik
  - e. kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara

20. Pelaksanaan demokrasi baru sebatas interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi tersebut terjadi di Indonesia pada periode . . . .
- 1945–1949
  - 1949–1959
  - 1959–1965
  - 1965–1980
  - 1980–1998
21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
- 1) Pembubaran DPR oleh presiden pada 1960.
  - 2) MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
  - 3) Presiden membatalkan Ketetapan MPRS Nomor III/1963.
  - 4) Ketua DPR-GR diangkat sebagai menteri.
  - 5) DPR-GR diberi beberapa hak kontrol.

Konsep demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang ditunjukkan oleh angka . . . .

- 1), 2), dan 3)
  - 1), 2), dan 4)
  - 2), 3), dan 4)
  - 2), 3), dan 5)
  - 3), 4), dan 5)
22. Perhatikan informasi berikut!

Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita, dari total populasi Indonesia ada 98,1 juta jiwa yang menjadi perhatian pemerintah atau sekira 40% dari total populasi masyarakat Indonesia dengan perekonomian yang dikategorikan sulit. Akan tetapi, dari angka tersebut hanya 18% atau berjumlah 10 juta keluarga yang dikategorikan paling miskin. Para keluarga miskin ini merupakan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang setiap tahun jumlahnya semakin tinggi.

**Sumber:** <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4269983/dana-bantuan-masyarakat-paling-miskin-naik-rp-13-t-dalam-4-tahun, diunduh 24 Januari 2019>

Informasi tersebut menunjukkan arti penting kehidupan demokrasi, yaitu . . . .

- distribusi pendapatan secara adil
- kebebasan yang bertanggung jawab
- kebebasan mengemukakan pendapat
- persamaan kedudukan di muka hukum
- partisipasi dalam pembuatan kebijakan

23. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah adalah . . . .
- aktif dalam kegiatan siskamling
  - mendengarkan nasihat orang tua
  - mengikuti kegiatan karang taruna
  - bekerja sama menjaga kebersihan rumah
  - membagi tugas piket dengan musyawarah
24. Sikap toleran terhadap keragaman di Indonesia sesuai norma demokrasi menurut Nurcholish Madjid, yaitu . . . .
- musyawarah
  - kesadaran akan pluralisme
  - terpenuhinya kebutuhan pokok
  - cara harus sejalan dengan tujuan
  - permufakatan yang jujur dan sehat
25. Norma demokrasi ini merupakan proses pengenalan, pengajaran, pembiasaan, dan penginternalisasian nilai-nilai demokrasi dalam diri seseorang. Melalui norma demokrasi ini seseorang akan belajar menghargai orang lain, cara mengambil keputusan, dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Norma demokrasi yang dimaksud adalah . . . .
- pendidikan demokrasi
  - kesadaran akan pluralisme
  - terpenuhinya kebutuhan pokok
  - permufakatan yang jujur dan sehat
  - kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap saling percaya
26. Kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang merupakan contoh hukum menurut isinya, yaitu . . . .
- hukum privat
  - hukum publik
  - hukum positif
  - hukum subjektif
  - hukum yang dicita-citakan
27. Hukum menurut wujudnya ditunjukkan oleh pilihan . . . .

<b>a.</b>	- hukum privat - hukum publik
<b>b.</b>	- hukum objektif - hukum subjektif
<b>c.</b>	- hukum materiel - hukum formal
<b>d.</b>	- hukum bersifat memaksa - hukum bersifat mengatur
<b>e.</b>	- hukum positif - hukum yang dicita-citakan

28. Keputusan hakim ini muncul apabila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang sehingga hakim harus menciptakan hukum sendiri. Dalam hukum menurut sumbernya, keputusan hakim tersebut disebut . . . .
- traktat
  - doktrin
  - kebiasaan
  - yurisprudensi
  - undang-undang
29. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh . . . .
- Aristoteles
  - Jeremy Bentham
  - Soerjono Soekanto
  - Surojo Wignjodipuro
  - Sudikno Mertokusumo
30. Peradilan tidak boleh berbelit-belit menunjukkan arti asas yang digunakan dalam peradilan nasional, yaitu asas . . . .
- jujur
  - cepat
  - bebas
  - sederhana
  - biaya ringan
31. Hakim bertindak memimpin jalannya persidangan dalam proses . . . .
- penyidikan
  - penahanan
  - penuntutan
  - penyelidikan
  - pemeriksaan
32. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut!
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
  - Mengadili pada tingkat kasasi.
  - Memutus pembubaran partai politik.
  - Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- Kewenangan Komisi Yudisial ditunjukkan oleh angka . . . .
- 1) dan 2)
  - 1) dan 3)
  - 1) dan 4)
  - 2) dan 4)
  - 3) dan 4)
33. Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM adalah . . . .
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
34. Lembaga peradilan sipil terdiri atas peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum meliputi . . . .
- pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
  - pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota provinsi, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
  - peradilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, peradilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara
  - peradilan agama berkedudukan di ibu kota provinsi, peradilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara
  - peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, peradilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara
35. Perhatikan lembaga-lembaga berikut!
- Pengadilan agama
  - Pengadilan negeri
  - Pengadilan tinggi
  - Pengadilan tinggi agama
  - Mahkamah Agung
- Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjukkan oleh angka . . . .
- 1), 2), dan 3)
  - 1), 2), dan 4)
  - 2), 3), dan 4)
  - 2), 3), dan 5)
  - 3), 4), dan 5)

36. Pimpinan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara disumpah oleh . . . .
- presiden
  - ketua Komisi Yudisial
  - ketua Mahkamah Agung
  - ketua Mahkamah Konstitusi
  - menteri hukum dan hak asasi manusia
37. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Tugas pokok pengadilan tingkat pertama, yaitu . . . .
- memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti
  - melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya
  - mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di wilayah hukumnya
  - menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama
  - mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding
38. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas merupakan kekuasaan . . . .
- pengadilan tinggi
  - pengadilan negeri
  - pengadilan militer
  - pengadilan tata usaha negara
  - pengadilan militer tinggi tingkat pertama
39. Perhatikan cerita berikut!

Pak Sigit berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor. Saat mengisi BBM di SPBU, Pak Sigit ingat tidak membawa SIM dan STNK. Oleh karena itu, Pak Sigit memutuskan kembali ke rumah untuk mengambil SIM dan STNK.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Pak Sigit . . . .

- takut jika ada operasi tilang
  - kurang memperhatikan jam kantor
  - sangat terburu-buru berangkat ke kantor
  - sadar atas kewajibannya menaati hukum
  - kurang tertib dalam mempersiapkan perlengkapan berkendara
40. Dalam masyarakat terdapat beberapa jenis norma dan sanksi jika melanggar norma tersebut. Celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan merupakan sanksi norma . . . .
- adat
  - agama
  - hukum
  - kesusilaan
  - kesopanan

#### B. Kerjakan soal-soal berikut!

- Sebutkan empat bentuk hak asasi manusia sebagai wujud kedaulatan rakyat!
- Jelaskan secara singkat hak atas kebebasan pribadi!
- Sebutkan tiga kegiatan pokok dalam upaya penegakan HAM di Indonesia!
- Bedakan antara demokrasi formal dan demokrasi materiel!
- Tuliskan tiga prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl!
- Berikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan bangsa dan negara!
- Sebutkan empat unsur yang terdapat dalam hukum!
- Jelaskan penggolongan hukum menurut sifatnya!
- Apa yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat dua atau pengadilan banding?
- Sebutkan dua faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum!



# Kunci Jawaban dan Pembahasan Remedial Semester 1

## A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia di berbagai bidang kehidupan tanpa memandang perbedaan.

2. **Jawaban: b**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, serta hak rasa aman dan tenteram. Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

3. **Jawaban: a**

Dalam rangka penghormatan terhadap HAM diperlukan sikap dan perilaku positif yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penghormatan terhadap HAM di lingkungan masyarakat adalah menjaga ketenangan lingkungan saat pemeluk agama lain sedang merayakan hari besar, menolong tetangga yang terkena musibah, aktif dalam kerja bakti desa, mematuhi jam kunjung masyarakat, dan menjenguk tetangga yang sakit.

4. **Jawaban: c**

Faktor internal penyebab pelanggaran HAM merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri (pelanggar HAM). Contoh faktor internal penyebab pelanggaran HAM antara lain sikap egois (mementingkan diri sendiri), rendahnya tingkat kesadaran terhadap HAM, dan sikap tidak toleran terhadap orang lain. Sikap egois menyebabkan seseorang mengabaikan kewajibannya dan selalu menuntut haknya. Rendahnya tingkat kesadaran terhadap HAM menyebabkan seseorang bertindak semena-mena tanpa memperhatikan hak orang lain. Adapun sikap tidak toleran menyebabkan seseorang tidak menghormati dan tidak menghargai orang lain.

5. **Jawaban: e**

Kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan. Pengadilan HAM berat masa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM *Ad Hoc*, sedangkan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan, dapat diadili melalui pengadilan HAM.

6. **Jawaban: d**

Pasangan yang tepat antara instrumen HAM internasional dan ratifikasi sebagai berikut.

No.	Instrumen HAM Internasional	Ratifikasi
1)	Konvensi Internasional terhadap Anti- <i>apartheid</i> dalam Olahraga	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993
2)	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
3)	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998
4)	Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
5)	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

7. **Jawaban: a**

Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya melakukan beberapa peran sebagai berikut.

- Menjadi *resource center* tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.
- Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dan komunitas korban dengan menitikberatkan pada kepentingan korban.
- Menjadi inisiator atau pencetus perubahan serta perumusan kebijakan.

8. **Jawaban: c**

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk sebagai upaya penegakan hak asasi manusia. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini secara khusus menangani masalah anak.

9. **Jawaban: c**

Bentuk perilaku yang dapat membangun kehidupan harmonis dengan menegakkan HAM di lingkungan bangsa dan negara sebagai berikut.

- Berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- Mematuhi hukum positif di Indonesia.
- Melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah.
- Mengikuti seminar tentang penegakan HAM.

10. **Jawaban: d**

Pemeriksaan adalah rangkaian tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim HAM *Ad Hoc*. Pemeriksaan pada tingkat banding atau kasasi dilakukan paling lama 90 hari.

11. **Jawaban: e**

Rendahnya tingkat kesadaran seseorang terhadap HAM merupakan salah satu faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Rendahnya tingkat kesadaran seseorang terhadap HAM ditandai dengan sikap semena-mena tanpa memperhatikan hak orang lain. Faktor internal lainnya yang juga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu sikap egois dan sikap tidak toleran terhadap orang lain. Sikap egois menyebabkan seseorang mengabaikan kewajiban dan selalu menuntut hak. Sikap tidak toleran menyebabkan sikap tidak menghormati dan tidak menghargai orang lain.

12. **Jawaban: e**

Kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan. Pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM *Ad Hoc*, sedangkan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan, dapat diadili melalui pengadilan HAM. Contoh pelanggaran HAM berat masa lalu yang dapat diadili melalui pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah peristiwa kerusuhan Timor Timur pasca-jajak pendapat yang terjadi tahun 1999.

13. **Jawaban: b**

Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik, tetapi dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Demokrasi formal ini dianut oleh banyak negara di Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, demokrasi formal sering disebut demokrasi Barat atau liberal.

14. **Jawaban: e**

Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi campuran dan demokrasi materiel termasuk bentuk demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Jadi, pilihan yang tepat adalah e.

15. **Jawaban: c**

Robert A. Dahl mengemukakan adanya tujuh prinsip suatu negara dapat dinyatakan sebagai negara demokratis sebagai berikut.

- 1) Pejabat yang dipilih oleh rakyat.
- 2) Pemilihan (umum) yang bebas dan *fair*.
- 3) Hak pilih yang mencakup semua.
- 4) Hak untuk menjadi calon suatu jabatan.
- 5) Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan.
- 6) Informasi alternatif.
- 7) Kebebasan membentuk asosiasi.

16. **Jawaban: a**

Demokrasi menuntut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membangun negara kemakmuran (*welfare state*) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Negara kemakmuran adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

17. **Jawaban: d**

Dalam negara demokrasi pemegang kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintah dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengembalikan yang diperolehnya kepada rakyat. Kedaulatan rakyat dapat ditegakkan menyadari jika pemerintah tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

18. **Jawaban: e**

Rekrutmen politik harus terbuka sehingga wakil yang diusung benar-benar bisa membawa aspirasi rakyat. Rekrutmen politik yang terbuka merupakan pendukung rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan akan berjalan baik jika didukung rekrutmen politik yang terbuka. Dengan demikian, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang sama melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.

19. **Jawaban: d**

Pernyataan pada soal menunjukkan salah satu prinsip demokrasi, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Keikutsertaan warga negara dalam pembentukan keputusan politik tecermin dari keikutsertaan warga negara dalam memberikan masukan tentang suatu kebijakan kepada pemerintah.

20. **Jawaban: a**

Pada periode 1945–1949 atau disebut periode revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru sebatas interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Partai politik berkembang dengan cepat. Fungsi partai politik adalah memenangi revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan sikap antipenjajahan.

21. **Jawaban: b**

Jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, konsep demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti berikut.

- 1) Pembubaran DPR oleh presiden pada 1960.
- 2) MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- 3) Ketua DPR-GR diangkat sebagai menteri.
- 4) Presiden mengeluarkan produk-produk legislatif dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR dengan mengacu pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukumnya.

22. **Jawaban: a**

Demokrasi meliputi semua aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Dalam



bidang ekonomi semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada warga miskin, misalnya dengan memberikan bantuan dalam program keluarga harapan (PKH). Melalui program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil antarwarga negara Indonesia.

23. **Jawaban: e**

Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah sebagai berikut.

- 1) Membagi tugas piket dengan musyawarah.
- 2) Menyukseskan pemilihan ketua OSIS.
- 3) Menghargai teman yang sedang mengemukakan pendapat.
- 4) Mematuhi tata tertib sekolah.
- 5) Menghormati Bapak/Ibu Guru.

24. **Jawaban: b**

Kesadaran akan pluralisme merupakan pengakuan terhadap kemajemukan dalam masyarakat yang diwujudkan melalui perilaku nyata. Kesadaran tersebut akan membentuk cara pandang masyarakat terhadap pluralitas. Wujud dari kesadaran akan pluralisme adalah sikap toleran. Sikap toleran dapat memecahkan permasalahan yang disebabkan oleh keragaman di Indonesia.

25. **Jawaban: a**

Pendidikan demokrasi merupakan proses pengenalan, pengajaran, pembiasaan, dan penginternalisasian nilai-nilai demokrasi dalam diri seseorang. Pada umumnya pendidikan demokrasi masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penanaman konsep sehingga belum sampai pada taraf tindakan nyata. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pendidikan demokrasi sejak dini sehingga nilai-nilai demokrasi dapat terwujud dalam tindakan nyata. Nilai-nilai demokrasi akan tercipta dengan sendirinya ketika masyarakat telah memahami dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam tindakan nyata.

26. **Jawaban: a**

Hukum dilihat dari isinya dibagi dua. *Pertama*, hukum privat, yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarorang dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contohnya, kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang. *Kedua*, hukum publik, yaitu kumpulan hukum yang

mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau antara negara dengan perseorangan. Hukum publik terdiri atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional.

27. **Jawaban: b**

Penggolongan hukum menurut wujudnya dibagi dua. *Pertama*, hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum menitikberatkan pada substansi peraturannya. *Kedua*, hukum subjektif, yaitu perwujudan hukum objektif yang berupa hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban.

28. **Jawaban: d**

Ketika hakim menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang, hakim harus menciptakan hukum sendiri. Keputusan yang dihasilkan apabila dianggap adil dan baik akan dipakai hakim lain untuk memutuskan perkara serupa (yurisprudensi).

29. **Jawaban: e**

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketertiban dapat tercapai dengan adanya upaya dari setiap orang untuk menaati hukum. Seseorang dapat menaati hukum atas dasar alasan yang bermacam-macam antara lain karena kesadaran bahwa melanggar hukum merupakan perbuatan tercela atau karena keterpaksaan agar tidak terkena sanksi. Apa pun alasannya yang dilihat adalah tujuannya, yaitu mencapai ketertiban.

30. **Jawaban: d**

Ada beberapa asas yang digunakan dalam peradilan nasional yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 1) Asas sederhana, artinya peradilan tidak boleh berbelit-belit.
- 2) Asas cepat, artinya proses peradilan tidak boleh ditunda-tunda.
- 3) Asas biaya ringan, artinya proses peradilan harus menekan seminimal mungkin biaya yang digunakan.

31. **Jawaban: e**

Dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, hakim bertindak memimpin jalannya persidangan. Artinya, hakim yang mengatur dan

mengarahkan tata tertib pemeriksaan. Hakim juga berwenang menentukan hukum yang diterapkan dan memutus perkara yang disengketakan.

32. **Jawaban: c**

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

33. **Jawaban: b**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

34. **Jawaban: a**

Lembaga peradilan sipil terdiri atas peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara.

35. **Jawaban: d**

Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan agama berpuncak di Mahkamah Agung.

36. **Jawaban: c**

Perangkat pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara disumpah oleh ketua Mahkamah Agung.

37. **Jawaban: d**

Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Tugas pokok pengadilan

tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pokoknya memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

38. **Jawaban: e**

Kekuasaan pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama sebagai berikut.

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwaanya ialah:
  - a) prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas;
  - b) mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang terdakwaanya atau salah satu terdakwaanya "termasuk tingkat kepangkatan" mayor ke atas; dan
  - c) mereka yang berdasarkan undang-undang diadili oleh pengadilan militer tinggi.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkata bersenjata.

39. **Jawaban: d**

Sudah sepantasnya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesadaran hukum tinggi. Kesadaran hukum tersebut dapat membawa pengaruh positif terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Kesadaran hukum Pak Sigit menciptakan tertib dalam berkendara. Dengan tindakan mengambil SIM dan STNK menunjukkan Pak Sigit sadar atas kewajibannya menaati hukum dalam berlalu lintas.

40. **Jawaban: e**

Norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Sanksi norma kesopanan bersifat tidak tegas, yaitu berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan.

## B. Uraian

1. Empat bentuk hak asasi manusia sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagai berikut.
  - a. Hak mengemukakan pendapat.
  - b. Hak berkumpul dan mengadakan rapat.
  - c. Hak ikut serta dalam pemerintahan.
  - d. Hak menduduki jabatan.

2. Hak atas kebebasan pribadi berarti setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik mengeluarkan pendapat di depan umum, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, memeluk agama, dan bebas dari perbudakan.
3. Kegiatan pokok dalam upaya penegakan HAM di Indonesia sebagai berikut.
  - a. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum.
  - b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah pelanggaran HAM.
4. Perbedaan antara demokrasi formal dan demokrasi materiel sebagai berikut.
  - a. Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik tetapi dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Demokrasi formal ini dianut oleh banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, demokrasi formal sering disebut demokrasi Barat atau liberal.
  - b. Demokrasi materiel adalah sistem demokrasi yang mengutamakan paham kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas di antara rakyatnya. Penguasaan negara menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara dan hak pribadi tidak diakui. Demokrasi materiel ini sering disebut demokrasi Timur atau proletar karena dianut oleh banyak negara sosialis.
5. Robert A. Dahl mengemukakan adanya tujuh prinsip suatu negara dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi sebagai berikut.
  - a. Pejabat yang dipilih oleh rakyat.
  - b. Pemilihan (umum) yang bebas dan *fair*.
  - c. Hak pilih yang mencakup semua.
6. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan bangsa dan negara sebagai berikut.
  - a. Menggunakan hak pilih dalam pemilu.
  - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - c. Mengembangkan jiwa patriotis dan nasionalis.
7. Empat unsur yang terdapat dalam hukum sebagai berikut.
  - a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  - b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  - c. Peraturan itu bersifat memaksa.
  - d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.
8. Penggolongan hukum menurut sifatnya dibagi dua. *Pertama*, hukum bersifat memaksa. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, hukum pidana. *Kedua*, hukum bersifat mengatur. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, contohnya hukum dagang.
9. Wewenang pengadilan tingkat dua atau pengadilan banding sebagai berikut.
  - a. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
  - b. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.
10. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan faktor-faktor berikut.
  - a. Sanksi hukumnya yang terlalu rendah.
  - b. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.